

**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**



**RENCANA STRATEGIS
KANTOR KESBANGPOL
TAHUN 2017-2022**

K A T A P E N G A N T A R

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang lebih berdaya dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022. Renstra ini dirancang sebagai dokumen perencanaan yang mampu memberikan arahan, memudahkan pencapaian tujuan secara terukur. Renstra Kantor Kesbang dan Politik ini dimaksudkan menjadi pegangan umum perencanaan dalam rangka menyusun program dan kegiatan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.

Renstra Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang dihasilkan melalui proses yang melibatkan seluruh pegawai pada Kantor Kesbang dan Politik. Proses partisipatif ini dilakukan atas dasar dua pertimbangan yaitu: *Pertama*, rencana strategis sebagai dokumen penting dan menjadi pedoman dalam menggerakkan roda kelembagaan secara langsung dipahami secara bersama-sama oleh semua yang terlibat dalam pembahasan rencana strategis; dan *Kedua*, pembahasan rencana strategis tidak saja menjadi bagian dari proses pembelajaran bersama bagi seluruh staf/pegawai, namun juga sebagai *entry point* membangun konsolidasi lembaga Kesbang dan Politik, khususnya dalam menyepakati *common platform* kelembagaan dan mengembangkan interaksi yang produktif.

Secara umum, dokumen Renstra ini telah memuat rencana program dan kegiatan, serta indikasi alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) tahun kedepan. Dengan Ridho Allah SWT, semoga dokumen Renstra ini dapat lebih meningkatkan kinerja Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam mencapai visi kedepan.

Liwa,

2019

KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

MUZAKAR, SE.

PEMBINA

NIP. 19660512 198603 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	35
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi	40
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	41
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	45

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	45
.....	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
.....	48
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	
.....	
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	52
.....	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	64
.....	
BABVIII P E N U T U P	67
.....	
 L A M P I R A N	

BAB I **P E N D A H U L U A N**

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan yang baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran. Komponen Perencanaan Strategis mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022 yang memuat visi, misi dan strategi utama, serta menjadi komitmen Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyusunan Renstra OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Untuk itu sesuai dengan kewenangan yang ada, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat memerlukan adanya satu acuan/pedoman kebijakan bagi program kerja selama lima tahun ke depan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat. Dokumen Renstra tersebut dirancang sebagai dokumen perencanaan yang mampu memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu Renstra disusun berdasarkan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan RPJMD Kabupaten Lampung Barat 2017 - 2022.

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat 2017 - 2022 adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang dihasilkan melalui proses yang melibatkan seluruh

pegawai pada Kantor Kesbang dan Politik. Proses partisipatif dalam penyusunan dokumen rencana strategis ini dilakukan atas dasar dua pertimbangan yaitu: *Pertama*, rencana strategis sebagai dokumen penting dan menjadi pedoman dalam menggerakkan roda kelembagaan secara langsung dipahami secara bersama-sama oleh semua yang terlibat dalam pembahasan rencana strategis; dan *Kedua*, pembahasan rencana strategis tidak saja menjadi bagian dari proses pembelajaran bersama bagi seluruh staf/pegawai, namun juga sebagai *entry point* membangun konsolidasi lembaga Kesbang dan Politik, khususnya dalam menyepakati *common platform* kelembagaan dan mengembangkan interaksi yang produktif.

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat bertujuan untuk merumuskan agenda-agenda jangka menengah Kantor Kesbang dan Politik dalam periode Tahun 2017 - 2022. Program kerja dirumuskan menurut skala prioritas, jelas dan terukur, sehingga pada gilirannya *output* dan *outcome* pelaksanaan program diharapkan dapat berkontribusi secara nyata dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional secara menyeluruh. Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik juga ditujukan sebagai panduan penyelenggara kegiatan agar tetap dalam koridor visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai oleh Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja serta Rencana Kerja Anggaran (RKA). Oleh karena itu Renstra ini memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat untuk jangka waktu lima tahun kedepan dimana program-program yang diusulkan diharapkan dapat dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Barat. Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, juga akan dipergunakan sebagai pedoman, landasan, dan referensi dalam menetapkan skala prioritas Rencana Kerja dimana penjabarannya akan dituangkan lebih lanjut dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan kepentingan tersebut diatas, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sangat berkepentingan untuk

menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2017 – 2022. Dengan demikian perencanaan dan program untuk lima tahun kedepan akan dapat dilakukan secara lebih terarah dan terukur. Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022 merupakan dokumen perencanaan program kerja selama lima tahun yang berdasarkan hierarkinya disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022.

Lebih lanjut Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022 sebagai dokumen perencanaan yang bersifat “indikatif” pedoman atau landasan dalam mekanisme perencanaan program tahunan dan penganggaran, dalam rangka penyusunan rencana kerja OPD serta rencana kegiatan anggaran (RKA). Bersifat “indikatif” maksudnya bahwa informasi baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang terkandung di dalam dokumen Renstra ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat disusun berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi yang ada. Disamping itu penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan program-program yang ada dan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) ini adalah :

1. Tujuan Umum

Penyusunan Rencana Strategis bertujuan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai adalah :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan program Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang menyeluruh, terpadu serta selaras dengan Renstra Kabupaten Lampung Barat untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dari tahun 2017 – 2022.
- b. Terciptanya suatu acuan atau rujukan bagi penyusunan program bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

- c. Menjadi bahan acuan bagi pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang akan dipertanggungjawabkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik setiap tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 23 Tahun 2014 tanggal 23 April 2014 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat, struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Kantor yang membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Kesatuan Bangsa, Seksi Politik dan Seksi Hubungan Antar Lembaga.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesatuan bangsa dan politik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga; dan
- e. Pelayanan administratif di kantor kesatuan bangsa dan politik.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai rincian tugas :

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesatuan bangsa dan politik;

- c. Merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal, Dinas-Dinas dan Satuan Kerja lainnya sehubungan dengan mensosialisasikan kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan tugas serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan atau masukan kepada pimpinan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan yang berhubungan dengan Kesatuan Bangsa, Politik dan Hubungan Antar Lembaga;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- h. Menilai Prestasi Kerja PNS di lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk tugas, fungsi dan rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan tata usaha dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik serta melakukan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang ketatausahaan;

- b. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja kantor;
- c. Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan, keuangan, surat menyurat dan kerumahtanggaan; dan
- d. Pengevaluasian, monitoring dan pelaporan kegiatan di lingkup Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai rincian tugas :

- a. Memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja di Sub Bagian Tata Usaha Kantor yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang tata usaha kantor;
- c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang tata usaha kantor;
- d. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pengembangan tata usaha dan administrasi umum;
- f. Menyiapkan bahan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, umum, kepegawaian surat menyurat, kerumahtanggaan, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan;
- h. Melaksanakan kegiatan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari Dana Bantuan Pemerintah dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan Surat Administrasi lainnya;
- j. Melaksanakan urusan rumah tangga, pemeliharaan kantor, dan pemeliharaan peralatan kantor;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain;
- l. Menyiapkan pertemuan-pertemuan dan rapat dinas;

- m. Menyusun informasi dan laporan triwulan, semester dan atau tahunan kepada pimpinan;
- n. Menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- o. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagai pertanggung jawaban;
- p. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- q. Menilai Prestasi Kerja PNS di lingkup Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- r. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Seksi Kesatuan Bangsa

Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesatuan bangsa;
- c. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesatuan bangsa; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesatuan bangsa

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai rincian tugas :

- a. Memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja di Seksi Kesatuan Bangsa yang menjadi tugas dan kewenangannya;

- b. Menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang kesatuan bangsa;
- c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesatuan bangsa;
- d. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan kegiatan program bidang kesatuan bangsa dengan instansi vertikal, lembaga pemerintah dan non pemerintah lainnya;
- e. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan warga negara asing;
- f. Melaksanakan inventarisasi permasalahan, berkoordinasi dan merumuskan pemecahan masalah yang timbul di bidang wawasan kebangsaan, bela negara, pranata sosial, pembauran dan kewarganegaraan serta kerukunan dalam kehidupan beragama;
- g. Menyiapkan bahan, menghimpun, mempelajari dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, pedoman teknis dan kebijakan teknis lainnya tentang pembinaan pengembangan kesatuan bangsa;
- h. Menyiapkan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengerahan sumber daya, pengendalian operasi dan bimbingan teknis bidang penanganan konflik;
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun program, data serta melaksanakan kegiatan bidang penanganan konflik, kesiagaan menghadapi konflik serta analisis potensi konflik;
- j. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan rehabilitasi, rekonstruksi korban konflik dan rekonsiliasi konflik;
- k. Menyiapkan bahan, data dan menyusun program, fasilitasi dan melaksanakan kegiatan meningkatkan rasa solidaritas sosial dan kewaspadaan masyarakat;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- m. Menilai Prestasi Kerja PNS di lingkup Seksi Kesatuan Bangsa berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan

- n. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Seksi Politik

Seksi Politik mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang politik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Politik mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang politik;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang politik;
- c. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang politik; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang politik.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Politik mempunyai rincian tugas :

- a. Memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja di Seksi Politik yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang politik;
- c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang politik;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan program dengan instansi vertikal, lembaga pemerintah dan non pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang politik;
- e. Mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang politik;
- f. Membentuk Desk Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten, dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati;
- g. Melaksanakan inventarisasi dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten, Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Kepala Daerah;

- h. Menyusun kebijakan daerah untuk pengawasan, pengembangan dan pemberdayaan di bidang politik meliputi fasilitasi organisasi politik dan budaya politik;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- j. Menilai Prestasi Kerja PNS di lingkup Seksi Politik berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- k. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Seksi Hubungan Antar Lembaga

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga;
- c. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai rincian tugas :

- a. Memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja di Seksi Hubungan Antar Lembaga yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga;

- c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang hubungan antar lembaga;
- d. Menyusun dan merumuskan kebijakan dasar pengembangan hubungan antar lembaga;
- e. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan kegiatan program bidang hubungan antar lembaga dengan instansi vertikal, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah;
- f. Melakukan inventarisasi permasalahan, berkoordinasi dan merumuskan permasalahan yang timbul di bidang hubungan antar lembaga;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- h. Menilai Prestasi Kerja PNS di lingkup Seksi Hubungan Antar Lembaga berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk mendukung program/kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat perlu adanya sumber daya yang dimiliki supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Barat antara lain :

- a. Jumlah pegawai berdasarkan golongan.
 - Golongan IV berjumlah 1 (satu) orang.
 - Golongan III berjumlah 5 (lima) orang
 - Golongan II berjumlah 4 (empat) orang
 - Golongan I berjumlah 1 (satu) orang
 - THLS berjumlah 5 (lima) orang

- b. Jumlah pegawai dalam jabatan dan staf
- Esselon II sebanyak –
 - Esselon III sebanyak 1 (satu) orang
 - Esselon IV sebanyak 4 (empat) orang
 - Staf (termasuk THLS) sebanyak 11 (sebelas) orang
- c. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
- Pendidikan S2 sebanyak 2 (dua) orang
 - Pendidikan S1 sebanyak 4 (empat) orang
 - Pendidikan D3 sebanyak – orang
 - Pendidikan SMA sebanyak 4 (empat) orang
 - Pendidikan SMP sebanyak –
 - Pendidikan SD sebanyak 1 (satu) orang

Sedangkan untuk asset maupun barang-barang yang merupakan sarana pendukung dalam menjalankan tugas serta fungsi pada Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Barat antara lain sebagai berikut :

No	Nama Barang	Ukuran/ CC	Tahun Pembuatan /Pembelian	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Mobil Toyota Kijang Kapsul	1781	2003	1 unit	Baik
2	Motor TS 125	125	2003	1 unit	Baik
3	Motor Honda MCB Win	97	2004	1 unit	Baik
4	Motor Suzuki A 100		1994	1 unit	Baik
5	Genset 5000 w	5000	2005	1 unit	Baik
6	Meja Biro	1 Biro	2008	4 bh	Baik
7	Meja ½ Biro	½ Biro	1992	1 bh	Baik
8	Meja Biasa	½ Biro	1992	2 bh	Baik
9	Meja Biasa	½ Biro	1992	1 bh	Baik
10	Meja ½ Biro	½ Biro	1992	7 bh	Baik
11	Meja ½ Biro	½ Biro	1999	2 bh	Baik
12	Meja ½ Biro	½ Biro	1999	5 bh	Baik
13	Meja ½ Biro	½ Biro	1999	1 bh	Baik
14	Meja ½ Biro	½ Biro	1999	1 bh	Baik
15	Meja ½ Biro	½ Biro	1999	1 bh	Baik
16	Meja ½ Biro	½ Biro	2003	1 bh	Baik
17	Meja ½ Biro	½ Biro	2006	1 bh	Baik
18	Meja Kerja ½ Biro	½ Biro	2008	2 bh	Baik
19	Kursi Biro	1 Biro	1992	1 bh	Baik
20	Kursi Biro	1 Biro	1992	1 bh	Baik
21	Kursi Biro	Biro	1992	1 bh	Baik

22	Kursi Putar 1 Biro	1 Biro	2008	3 bh	Baik
23	Kursi Putar	½ Biro	1992	1 bh	Baik
24	Kursi Putar Besar		1992	1 bh	Baik
25	Kursi Putar		1992	2 bh	Baik
26	Kursi Putar		1992	1 bh	Baik
27	Kursi Putar ½ Biro		2008	5 bh	Baik
28	Kursi Lipat	Standart	2001	3 bh	Baik
29	Kursi Lipat	Standart	2005	2 bh	Baik
30	Kursi Lipat	Standart	2005	2 bh	Baik
31	Kursi Rapat	Standart	2008	10 bh	Baik
32	Kursi Tamu		2007	1 set	Baik
33	Sofa/Sice		2008	1 set	Baik
34	Papan Kegiatan		1992	1 bh	Baik
35	Papan Data		1999	1 bh	Baik
36	Komputer		2007	2 bh	Baik
37	Komputer Notebook		2008	1 bh	Baik
38	Filling Kabinet Kantor		2007	2 bh	Baik
39	Filling Kabinet		2008	6 bh	Baik
40	Cermin		1992	1 bh	Baik
41	Lemari Besi		2008	6 bh	Baik
42	Mesin Tik		1999	1 bh	Baik
43	Mesin Tik		2008	1 bh	Baik
44	Brankas		2008	1 bh	Baik
45	Meja Komputer		2001	1 bh	Baik
46	Dispenser		2001	1 bh	Baik
47	Hordeng		2004	2 bh	Baik
48	Hordeng		2004	2 bh	Baik
49	Hordeng		2004	4 bh	Baik
50	Hordeng		2004	2 bh	Baik
51	Hordeng		2004	6 bh	Baik
52	Hordeng		2004	2 bh	Baik
53	Teralis		2004	6	Baik
54	Teralis		2004	3	Baik
55	Teralis		2004	6	Baik
56	Teralis		2004	3	Baik
57	Teralis		2004	9	Baik
58	Teralis		2004	4	Baik
59	Gambar Bupati/Wakil		2004	1 bh	Baik
60	Foto Presiden/Wakil		2005	1 bh	Baik
61	Foto Gubernur/Wakil		2005	1 bh	Baik
62	Pesawat Fax		2004	1 bh	Baik
63	Mesin Faximile		2008	1 bh	Baik
64	Meja Rapat		2008	1 bh	Baik
65	Lemari Buku		2008	1 bh	Baik
66	White Board		2008	1 bh	Baik

67	Papan Data Linmas		2008	1 bh	Baik
68	Papan Data Ormas & LSM		2008	1 bh	Baik
69	Komputer SIPKD	Core i-3	2010	1 unit	Baik
70	Printer SIPKD	Laserjet	2010	1 unit	Baik
71	Komputer PC	Dual	2012	2 unit	Baik
72	Komputer Notebook	Core i-3	2012	1 unit	Baik
73	White Board		2012	1 unit	Baik
74	Pesawat Telepon		2001	1 bh	Baik
75	Handycam		2007	1 bh	Baik
76	Wearless		2007	1 bh	Baik
77	Standart (Tripod Corong)		2008	1 bh	Baik
78	Kamera Digital	16 MP	2012	1 unit	Baik
79	Komputer PC	Dual	2013	1 unit	Baik
80	Lemari Arsip	Besi	2016	4 unit	Baik
81	Kursi Lipat	Besi	2016	25 unit	Baik
82	Komputer PC Build Up	Core i-3	2016	2 unit	Baik
83	Cabinet 4 laci	Besi	2017	2 unit	Baik
84	Komputer PC Build Up	Core i-3	2017	1 unit	Baik
85	Komputer Notebook/Laptop	Core i-5	2017	1 unit	Baik
86	Kursi 1 Biro	1 Biro	2017	2 unit	Baik
87	Kursi ½ Biro	½ Biro	2017	4 unit	Baik
88	Meja 1 Biro	1 Biro	2017	2 unit	Baik
89	Meja ½ Biro	½ Biro	2017	4 unit	Baik
90	Mesin Tik	Manual	2017	1 unit	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah secara efektif memerlukan kondisi stabilitas politik dan keamanan masyarakat yang terjamin. Stabilitas politik dan keamanan masyarakat dapat dicapai melalui program yang terencana dengan baik.

Adapun tingkat capaian kinerja perangkat daerah Kantor Kesbang dan Politik berdasarkan sasaran/target Renstra perangkat daerah periode sebelumnya adalah :

S A S A R A N 1 :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U) TAHUN 2017 - 2022
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Misi V : Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Data Capaian Tahun 2017	Target				
								Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2		4	5	6	7						
1	Meningkatnya deteksi dini terjadinya konflik sosial	Persentase gejala konflik yang dapat diatasi	Persentase	$(X/Y) * 100 \%$ X = Jumlah gejala konflik yang dapat diatasi Y = Jumlah gejala konflik dalam setahun	Seksi Kesbang	Dokumen dan data kegiatan Seksi Kesbang	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
		Persentase cakupan wilayah rawan konflik	Persentase	$(X/Y) * 100 \%$ X = Jumlah pekon/kelurahan rawan konflik Y = Jumlah pekon/kelurahan se-Kabupaten	Seksi Kesbang	Dokumen dan data kegiatan Seksi Kesbang	8,09%	7,35%	5,88%	4,41%	2,94%	1,47%
2	Meningkatnya penanganan penyelesaian kasus konflik SARA	Jumlah konflik SARA yang diselesaikan	Jumlah	Cukup Jelas	Seksi Kesbang	Dokumen dan data kegiatan Seksi Kesbang	0 kasus (nihil kasus)	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus
3	Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat	Jumlah	Cukup Jelas	Seksi Hubtarga	Dokumen dan data kegiatan	333 orkemas	350 orkem as	367 orkem as	385 orkem as	405 orkem as	425 orkem as

	masyarakat yang dibentuk secara formal	yang memenuhi syarat legalitas				Seksi Hubtarga						
4	Menurunnya kasus konflik terkait politik	Persentase kasus terkait politik yang diselesaikan	Persentase	$(X/Y) * 100 \%$ X = Jumlah kasus terkait politik yang diselesaikan Y = Jumlah kasus terkait politik dalam setahun	Seksi Politik	Dokumen dan data kegiatan Seksi Politik		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun stabilitas politik yang demokratis dan dinamis.

Indikator kinerjanya yaitu persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi negara di Kabupaten Lampung Barat.

Pencapaian target indikator sasaran 1 yakni persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi negara di Kabupaten Lampung Barat, Untuk Tahun 2013 tercapai 0,00% dari target sebesar 45,60% dengan tingkat capaian 0,00%. Kondisi ini disebabkan antara lain karena tidak terdapat pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi negara yang dilaksanakan di kecamatan-kecamatan.

Untuk Tahun 2014 tercapai 0,00% dari target sebesar 59,20% dengan tingkat capaian 0,00%. Kondisi ini disebabkan antara lain karena tidak terdapat pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi negara yang dilaksanakan di kecamatan-kecamatan.

Untuk Tahun 2015 tercapai 33,33% dari target sebesar 72,80% dengan tingkat capaian 45,79%. Kondisi ini disebabkan antara lain karena pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi negara hanya dilaksanakan di 5 (lima) kecamatan saja dari 15 (lima belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

Untuk Tahun 2016 tercapai 33,33% dari target sebesar 86,40% dengan tingkat capaian 38,58%. Kondisi ini disebabkan antara lain karena pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi negara hanya dilaksanakan di 5 (lima) kecamatan saja dari 15 (lima belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

Untuk Tahun 2017 tercapai 33,33% dari target sebesar 100% dengan tingkat capaian 33,33%. Kondisi ini disebabkan antara lain karena pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi negara hanya dilaksanakan di 5 (lima) kecamatan saja dari 15 (lima belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

S A S A R A N 2 :

Meningkatnya peran serta lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam pembangunan daerah.

Indikator kinerjanya yaitu persentase pertumbuhan dan perkembangan Ormas dan LSM

Pencapaian target indikator sasaran 2 yakni Persentase pertumbuhan dan perkembangan Ormas dan LSM,

Untuk Tahun 2013 tercapai -22,36% dari target sebesar 50,86% dengan tingkat capaian -43,96%. Kondisi ini disebabkan antara lain pertumbuhan dan perkembangan Ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2013 berjumlah 125 Ormas dan LSM sedangkan di tahun 2012 terdapat 161 Ormas dan LSM, terdapat penurunan sebanyak 36 Ormas/LSM.

Untuk Tahun 2014 tercapai -0,80% dari target sebesar 63,15% dengan tingkat capaian -1,27%. Kondisi ini disebabkan antara lain pertumbuhan dan perkembangan Ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2014 berjumlah 124 Ormas dan LSM sedangkan di tahun 2013 terdapat 125 Ormas dan LSM, terdapat penurunan sebanyak 1 Ormas/LSM.

Untuk Tahun 2015 tercapai 94,35% dari target sebesar 75,44% dengan tingkat capaian 125,07%. Kondisi ini disebabkan antara lain pertumbuhan dan perkembangan Ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2015 berjumlah 241 Ormas dan LSM sedangkan di tahun 2014 terdapat 124 Ormas dan LSM, terdapat kenaikan/peningkatan sebanyak 117 Ormas/LSM.

Untuk Tahun 2016 tercapai 21,99% dari target sebesar 87,73% dengan tingkat capaian 25,07%. Kondisi ini disebabkan antara lain pertumbuhan dan perkembangan Ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2016 berjumlah 294 Ormas dan LSM sedangkan di tahun 2015 terdapat 241 Ormas dan LSM, terdapat kenaikan/peningkatan sebanyak 53 Ormas/LSM.

Untuk Tahun 2017 tercapai 13,27% dari target sebesar 100% dengan tingkat capaian 13,27%. Kondisi ini disebabkan antara lain pertumbuhan dan perkembangan Ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2017 berjumlah 333 Ormas dan LSM sedangkan di tahun 2016 terdapat 294 Ormas dan LSM, terdapat kenaikan/peningkatan sebanyak 39 Ormas/LSM.

Ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Lampung Barat terdiri dari ORMAS, OKP, PROFESI, PAGUYUBAN dan LSM.

S A S A R A N 3 :

Meningkatnya kesadaran hukum dan politik masyarakat.

Indikator kinerjanya yaitu persentase partai politik yang difasilitasi.

Pencapaian target indikator sasaran 3 yakni persentase partai politik yang difasilitasi,

Untuk Tahun 2013 tercapai 50,00% dari target sebesar 67,94% dengan tingkat capaian 73,59%. Kondisi ini disebabkan antara lain partai politik yang difasilitasi berjumlah 17 partai politik dari 34 partai politik yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Partai politik yang difasilitasi tersebut merupakan partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan hasil pemilu Tahun 2009.

Untuk Tahun 2014 tercapai 50,00% dari target sebesar 75,95% dengan tingkat capaian 65,83%. Kondisi ini disebabkan antara lain partai politik yang difasilitasi berjumlah 17 partai politik dari 34 partai politik yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Partai politik yang difasilitasi tersebut merupakan partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan hasil pemilu Tahun 2009.

Untuk Tahun 2015 tercapai 83,33% dari target sebesar 83,96% dengan tingkat capaian 99,25%. Kondisi ini disebabkan antara lain partai politik yang difasilitasi berjumlah 10 partai politik dari 12 partai politik yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Partai politik yang difasilitasi tersebut merupakan partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan hasil pemilu Tahun 2014.

Untuk Tahun 2016 tercapai 83,33% dari target sebesar 91,97% dengan tingkat capaian 90,61%. Kondisi ini disebabkan antara lain partai politik yang difasilitasi berjumlah 10 partai politik dari 12 partai politik yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Partai politik yang difasilitasi tersebut merupakan partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan hasil pemilu Tahun 2014.

Untuk Tahun 2017 tercapai 76,92% dari target sebesar 100% dengan tingkat capaian 76,92%. Kondisi ini disebabkan antara lain partai politik yang difasilitasi berjumlah 10 partai politik dari 13 partai politik yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Partai politik yang difasilitasi tersebut merupakan partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan hasil pemilu Tahun 2014.

Adapun beberapa hasil pencapaian kinerja perangkat daerah berdasarkan indikator keluaran kegiatan antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap kunjungan tamu luar daerah/orang asing (WNA), maka didapat data tentang jumlah WNA pada Tahun 2012 sebanyak 395 orang, Tahun 2013 sebanyak 1.017 orang, Tahun 2014 sebanyak 22 orang, Tahun 2015 sebanyak – orang (nihil) dan Tahun 2016 sebanyak – orang (nihil). Lembaga Asing, Orang Asing dan Non Government Organisation (NGO) yang perlu dilakukan pemantauan antara lain: Kunjungan dan Kegiatan Diplomat/Tamu VIP/Dinas Warga Negara Asing ke Daerah, Kunjungan dan Kegiatan Tenaga Ahli/Konsultan/Lembaga Asing, Kunjungan dan Kegiatan Wartawan Asing dan Film Asing, Kunjungan dan Kegiatan Peneliti Asing, Kunjungan dan Kegiatan Artis Asing, Kunjungan dan Kegiatan Rohaniawan Asing, serta LSM Asing.

Dalam forum KOMINDA (Komunitas Inteligen Daerah), Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Barat melakukan koordinasi dengan Polres Lampung Barat, KODIM 0422 Lampung Barat, Kejaksaan Negeri Liwa dan Badan Intelijen Negara (BIN) dengan kegiatan yang bersifat insidentil sehingga terciptanya suasana yang kondusif di wilayah Kabupaten Lampung Barat. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan gangguan kamtibmas sangat baik. Misalnya dalam hal terjadinya demonstrasi yang menjurus anarkisme, pihak keamanan melalui pemantauan KOMINDA (Komunitas Intelijen Daerah) sudah mengetahui akan adanya unjuk rasa dan berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya anarkisme.

Berdasarkan pendataan terhadap Organisasi Kemasyarakatan, didapat hasil yaitu pada Tahun 2012 sebanyak 161 Orkemas, Tahun 2013 sebanyak 125 Orkemas, Tahun 2014 sebanyak 124 Orkemas, Tahun 2015 sebanyak 241 Orkemas, Tahun 2016 sebanyak 294 Orkemas dan Tahun 2017 sebanyak 333 Orkemas. Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat terdiri dari ORMAS, PROFESI, OKP (PEMUDA), PAGUYUBAN, dan LSM.

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) merupakan wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Keanggotaan FKDM Kabupaten terdiri dari wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh

masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya. Sedangkan Keanggotaan FKDM Kecamatan terdiri dari wakil-wakil ormas, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya. FKDM Kabupaten mempunyai tugas menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini, dan memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

Pembentukan satgas anti narkoba merupakan upaya untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba. Satgas anti narkoba dibentuk sebagai bagian dari upaya menggerakkan dan memotivasi masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dengan terbentuknya satgas anti narkoba yang diikuti oleh 3.162 orang peserta ini diharapkan secara mandiri nantinya dapat melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungannya.

Satgas anti narkoba diharapkan untuk :

1. Ikut berperan secara aktif membantu pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya untuk :
 - a. Mencegah masuknya narkoba di lingkungannya masing-masing.
 - b. Memberantas dan mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkoba di lingkungannya.
 - c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.
 - d. Menanggulangi korban akibat penyalahgunaan narkoba.
2. Membangun, membina dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar berperan aktif dalam hal tersebut di atas.
3. Menumbuhkan dan membina kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.
4. Memasyarakatkan budaya bangga karena hidup sehat tanpa narkoba

Pelaksanaan tes urine bagi Pejabat dan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat ini dilakukan sebagai bentuk komitmen

jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat beserta unsur Muspida dan instansi vertikal untuk menjadikan Lampung Barat terbebas dari peredaran gelap narkoba yang dapat merusak masa depan generasi muda dan tatanan sosial kemasyarakatan. Peserta tes urine ini terdiri dari pejabat eselon II, III, IV dan staf dari Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Kecamatan/Kelurahan se-Kabupaten Lampung Barat. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan pemerintahan yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini bebas dari peredaran obat-obatan terlarang atau narkoba dan mencegah generasi muda dari penyalahgunaan narkoba yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

Dalam fasilitasi partai politik penerima bantuan keuangan, dilakukan penelitian dan pemeriksaan serta verifikasi berkas/proposal pengajuan bantuan keuangan oleh partai politik. Partai politik yang mendapat bantuan keuangan adalah partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat. Adapun partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan hasil Pemilu 2009 sebanyak 17 (tujuh belas) partai politik antara lain PKPB (1 kursi), P. Gerindra (1 kursi), PKPI (2 kursi), PKS (1 kursi), PAN (4 kursi), PPIB (1 kursi), PKB (1 kursi), PNI Marhaenisme (1 kursi), P. Pelopor (1 kursi), P. Golkar (3 kursi), PPP (3 kursi), PDIP (10 kursi), PBR (2 kursi), P. Demokrat (6 kursi), PIS (1 kursi), PKNU (1 kursi) dan Partai Merdeka (1 kursi). Sedangkan partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan hasil Pemilu 2014 sebanyak 10 (sepuluh) partai politik yaitu :

- 1) Partai Nasional Demokrat (NASDEM) : 2 kursi;
- 2) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) : 3 kursi;
- 3) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) : 2 kursi;
- 4) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) : 13 kursi
- 5) Partai Golongan Karya (GOLKAR) : 3 kursi
- 6) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) : 2 kursi
- 7) Partai Demokrat (PD) : 4 kursi
- 8) Partai Amanat Nasional (PAN) : 2 kursi
- 9) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) : 2 kursi
- 10) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) : 2 kursi

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Disamping itu penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Hal-hal yang mendasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah adanya keinginan untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreatifitas, serta mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu dalam menyelenggarakan otonomi daerah, secara utuh akan menempatkan otonomi daerah pada daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten dan daerah kota berkedudukan sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat, namun tetap pada kerangka negara kesatuan.

Pengalaman dalam penyelenggaraan otonomi daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban dari pada hak maka penyelenggaraan otonomi daerah yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah pemberian otonomi kepada daerah kabupaten dan kota dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan

serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah. Kepala daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari kondisi stabilitas sosial politik di daerah yang bersangkutan. Kabupaten Lampung Barat dengan struktur masyarakat yang heterogen dan penyebaran penduduknya yang tidak merata, sangat rentan terhadap timbulnya gangguan berupa konflik horizontal dalam masyarakat. Selain itu, kondisi geografis dan topografis Kabupaten Lampung Barat yang sangat rentan terhadap bencana alam, sudah barang tentu juga akan berpengaruh terhadap jalannya roda pembangunan di daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah secara efektif memerlukan kondisi stabilitas politik dan keamanan masyarakat yang terjamin. Stabilitas politik dan keamanan masyarakat dapat dicapai melalui program yang terencana dengan baik.

Pembangunan bidang politik di Kabupaten Lampung Barat telah dilaksanakan sesuai tuntutan demokrasi yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi kelangsungan pembangunan daerah, antara lain penataan kehidupan politik yang di dukung oleh makin berperan dan berfungsinya supra struktur dan infra struktur politik dalam pengembangan tatanan kehidupan politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dinamika kehidupan politik makin meningkat dan berbagai aspirasi masyarakat melalui orasi dan berbagai kegiatan unjuk rasa di hadapan wakil-wakil rakyat di DPRD Kabupaten Lampung Barat telah dapat di tampung dan di tindaklanjuti oleh Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif. Fasilitasi terhadap keberadaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan diarahkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, agar semakin peka dan handal dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi kualitatif masyarakat yang akomodatif.

Sisi lain secara sosial politik, terdapat potensi konflik yang dapat mengemuka terutama sebagai akibat kecemburuan sosial yang timbul

akibat dari adanya kesenjangan fasilitas sosial ekonomi, kesenjangan memperoleh kesempatan kerja, kesenjangan pendidikan dan berbagai aspek lainnya. Hal ini tidak terlepas dari heterogenitas masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang sangat beragam.

Permasalahan yang diperkirakan masih mewarnai kehidupan sosial politik masyarakat antara lain pelaksanaan hak azasi manusia, supremasi hukum, demokratisasi, keterbukaan, kesenjangan dan kecemburuan sosial sebagai konsekuensi dari globalisasi informasi, ekonomi serta demokratisasi itu sendiri.

Gangguan kamtibmas yang timbul di Kabupaten Lampung Barat diperkirakan akan mengalami eskalasi, bukan lagi berdimensi kejahatan biasa tetapi kualitas kejahatan yang semakin canggih, serta tindakan-tindakan yang bersifat pemaksaan kehendak.

Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain yaitu :

Di bidang politik antara lain :

- a. Beranekaragamnya penduduk Kabupaten Lampung Barat dari segi agama dan suku bangsa jika tidak dibina akan menjadi potensi kelemahan yang dapat menimbulkan konflik SARA dan politik. Perubahan situasi politik nasional memberikan implikasi kompleks dalam kehidupan politik di daerah;
- b. Tantangan terberat dalam beberapa tahun kedepan adalah menjaga konsolidasi politik secara berkelanjutan, berupa reformasi struktur politik; penyempurnaan proses politik; pengembangan budaya politik yang lebih demokratis. Tantangan lain adalah mendorong terbangunnya partai politik yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat, mengagregasi dan menyalurkan aspirasi politik rakyat, serta menyeleksi pimpinan politik yang akan mengelola penyelenggaraan pemerintahan secara profesional;
- c. Tantangan lain adalah bagaimana melembagakan, kebebasan pers/media massa sebagai salah satu pilar demokrasi. Akses masyarakat yang bebas dan terbuka akan lebih memudahkan kontrol atas pemenuhan kepentingan publik.

Dibidang ketentraman dan ketertiban antara lain :

- a. Keragaman etnis yang tinggi memunculkan kerawanan berupa konflik bernuansa SARA. Selain itu, dampak daripada globalisasi dan era informasi menyebabkan terjadinya perubahan perilaku masyarakat;
- b. Mengingat posisi Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera dan dekat dengan pusat Pemerintahan memberikan potensi yang tinggi bagi munculnya gangguan stabilitas daerah seperti : terorisme, penyebaran NAPZA dan kriminalitas.

Di bidang hukum dan aparatur antara lain :

- a. Masih terdapat berbagai produk hukum yang tumpang tindih, inkonsisten, dan bertentangan antara peraturan yang sederajat satu dengan lainnya dan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan di atasnya; masih rendahnya budaya dan kesadaran hukum masyarakat; serta kurangnya independensi kelembagaan hukum, khususnya aparat penegak hukum di tingkat daerah;
- b. Perlunya peningkatan kesadaran penegakkan supremasi hukum di masyarakat; serta upaya menghapuskan kasus main hakim sendiri oleh sebagian masyarakat. Disamping itu, memberikan peran kepada lembaga-lembaga adat untuk menyadarkan anggotanya dalam penegakkan hukum yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat setempat;
- c. Perlunya struktur kelembagaan Pemerintah Daerah yang efisien dan efektif; pengembangan pemerintahan berorientasi kewirausahaan yang didukung oleh aparatur yang profesional dan kreatif, serta menguasai dan mampu memanfaatkan TI dalam bentuk E-Government untuk menghasilkan pelayanan publik lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah, serta mendukung penerapan prinsip pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Tantangan ini akan merespon desakan stakeholder akan perlunya dikembangkan pemerintahan yang berorientasi pada kewirausahaan (*entrepreneurship government*).
- d. Tantangan lain adalah perlunya penguatan kelembagaan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan pada tingkat desa/kelurahan.

Adapun beberapa peluang yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Perkembangan kehidupan politik di Kabupaten Lampung Barat yang relatif stabil dan dinamis merupakan kontribusi bagi kelangsungan dan kesinambungan pembangunan daerah dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang merupakan pondasi pembangunan daerah serta terjalinnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa, pengayom masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan dari sisi sosial politik, terdapat berbagai ragam kegiatan politik di Kabupaten Lampung Barat terutama dalam rangka pemilihan umum baik itu pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan umum Legislatif dan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, serta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati. Secara umum kondisi politik sosial politik di daerah Kabupaten Lampung Barat sangat dinamis dan berkembang semakin demokratis.
- b. Maraknya demokrasi yang semakin lama semakin baik dan dewasa menciptakan situasi politik yang dinamis dan bergairah. Selain Ormas/LSM serta partai politik di Kabupaten Lampung Barat juga tumbuh dan berkembang. Ormas/LSM yang sampai saat ini di Tahun 2017 telah terdata sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) Ormas/LSM yang terdiri dari :

- O R M A S	dengan jumlah 201
- P R O F E S I	dengan jumlah 29
- O K P (PEMUDA)	dengan jumlah 16
- PAGUYUBAN	dengan jumlah 31
- L S M	dengan jumlah 56

Keberadaan Ormas/LSM yang ada di Kabupaten Lampung Barat telah dapat memberikan kontribusi terhadap kelancaran pembangunan daerah.
- c. Hubungan antara Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif di Kabupaten Lampung Barat yang merupakan mitra kerja telah berjalan dengan baik dan saling menunjang sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, sehingga dapat menciptakan iklim sejuk sebagai modal dasar dalam mensukseskan pembangunan daerah.
- d. Hukum dan kebijakan tentang pemilu berkembang lebih akomodatif, dimana secara empirik dapat dicermati dari tingkat keberagaman peserta pemilu secara etnis, agama, dan jenis kelamin serta meningkatnya kiprah generasi muda dalam pemilihan Kepala Daerah,

DPR, DPD, DPR Propinsi, DPR Kabupaten/Kota. Realitas politik tersebut semakin memperkuat legitimasi pemilu sekaligus menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas pemilu dan membangun demokrasi Indonesia.

- e. Dukungan logistik, sarana dan prasarana serta dukungan lainnya yang diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah mampu meningkatkan kapasitas Kantor Kesbangpol dalam menjalankan program-program sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki.
- f. Berkurangnya tindakan kekerasan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan meningkatnya upaya penyelesaian pelanggaran pemilu melalui lembaga-lembaga hukum dan lembaga kompeten lainnya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencari kebenaran dan keadilan menunjukkan adanya kesadaran hukum yang tinggi. Kondisi ini tentu saja akan membuka ruang yang kondusif bagi publik yang akan mengembangkan wahana dan wacana pendidikan politik secara terbuka. Hal ini tentu saja semakin memperkuat posisi kontrol dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari kondisi stabilitas sosial politik di daerah yang bersangkutan. Kabupaten Lampung Barat dengan struktur masyarakat yang heterogen dan penyebaran penduduknya yang tidak merata, sangat rentan terhadap timbulnya gangguan berupa konflik horizontal dalam masyarakat. Selain itu, kondisi geografis dan topografis Kabupaten Lampung Barat yang rentan terhadap bencana alam, sudah barang tentu juga akan berpengaruh terhadap jalannya roda pembangunan di daerah. Kondisi seperti ini juga dapat memicu munculnya berbagai gangguan terhadap ketahanan baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

a. Bidang Sosial dan Politik

- Belum optimalnya pembinaan terhadap Ormas/LSM guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
- Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi.
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (Pemilu)
- Masih rendahnya kader partai politik dari kalangan perempuan.

b. Bidang Kesatuan Bangsa

- Sejak terjadinya krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia pada Tahun 2008, menimbulkan ancaman yang sangat serius terhadap persatuan bangsa, kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. Hal ini tampak dari konflik sosial yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa daerah dan perlu diantisipasi dampaknya di Kabupaten Lampung Barat.

- Berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan.
- Kerukunan kehidupan beragama serta menjalankan syariah ataupun ajaran dalam beragama sering ditemui aplikasinya masih dirasakan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pendirian rumah ibadah belum sepenuhnya merujuk kepada ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 dan 09 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
- Munculnya ajaran/aliran yang dianggap menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang sudah ada, sehingga dapat menimbulkan keresahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kondisi demikian sangat rawan dan rentan terjadinya gesekan yang menimbulkan konflik SARA.

c. Bidang Penanganan Masalah Aktual

Aspek-aspek permasalahan aktual yang tidak dapat di duga dan muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lampung Barat seringkali mempengaruhi bidang-bidang lainnya, sehingga dapat membuat pencitraan Kabupaten Lampung Barat menjadi tidak kondusif.

Beberapa permasalahan aktual yang seringkali terjadi antara lain adalah :

- Penyampaian aspirasi oleh beberapa elemen-elemen masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi, dengan cara pengerahan massa turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan mereka. Aksi damai seringkali tanpa disadari terkontaminasi sebagai akibat di provokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengarah untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Demonstrasi elemen masyarakat juga disampaikan kepada dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lampung Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat.

- Belum optimalnya pengawasan dan pemantauan terhadap orang asing (tenaga kerja asing) maupun lembaga asing yang berada di Kabupaten Lampung Barat.
- Belum optimalnya pengawasan dan pegendalian pulau-pulau terluar (berbatasan langsung dengan negara asing)
- Isu-isu terorisme
- Penyelundupan, penimbunan BBM bersubsidi, illegal fishing dan illegal logging serta trafficking.
- Maraknya penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, psikotropika dan zat adiktif lainnya di kalangan pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum lainnya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Barat. Oleh karena itu, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Visi merupakan preferensi dan pendekatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam hal menyelenggarakan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahap ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya melalui mekanisme ekonomi yang sehat, sistem sosial yang padu, tegaknya hukum, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Dengan menyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya serta

partisipasi aktif seluruh stakeholder, maka Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022 dirumuskan sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA”.

HEBAT : HARMONIS, ELOK, BERDAYA SAING, AMAN, dan TAQWA

Makna Visi :

Mengoptimalkan potensi yang ada dan sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat Lampung Barat.

Misi merupakan deskripsi rumpun tujuan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dijabarkan dari makna Visi yang ingin dicapai dan terukur untuk masa depan. Namun misi dapat dikaji ulang secara berkala disesuaikan dengan dinamika. Untuk Tahun 2017-2022, telah dirumuskan pernyataan Misi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat yaitu :

1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan **infrastruktur** secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kualitas **sumber daya manusia** yang sehat, cerdas dan berdaya saing;
3. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada **agrobisnis** dan **agrowisata** berbasis sumber daya lokal;
4. Meningkatkan **tata kelola pemerintahan** yang professional dan amanah dengan berorientasi pada **pelayanan publik**; dan
5. Mengembangkan **perikehidupan masyarakat** yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.

Dari kelima misi Kabupaten Lampung Barat tersebut, maka misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah misi yang ke-5 (lima) yaitu **“Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif”**.

Misi ke-5 (lima) Kabupaten Lampung Barat tersebut mempunyai Tujuan sebagai berikut :

- Terwujudnya masyarakat yang tertib dan sejahtera.

Sedangkan indikator tujuannya adalah persentase konflik SARA yang terselesaikan.

Dari Tujuan di atas pada Misi ke-5 (lima) Kabupaten Lampung Barat tersebut, maka dijabarkan lagi ke dalam Sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib.

Indikator sasarannya adalah :

- Persentase konflik SARA yang terselesaikan.
- Persentase kasus ketertiban, keamanan dan keindahan (K3) yang terselesaikan.

2. Menurunnya kasus kekerasan kepada perempuan dan anak.

indikator sasarannya adalah :

- Persentase kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani.

3. Meningkatnya kesetaraan gender.

indikator sasarannya adalah :

- Indeks pembangunan gender (poin).
- Indeks pemberdayaan gender (poin).

4. Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan daerah.

indikator sasarannya adalah :

- Angka kemiskinan.
- Indeks gini.

5. Menurunnya pengangguran.

indikator sasarannya adalah :

- Tingkat pengangguran terbuka.

Pada misi ke-5 (lima) tersebut diatas, tujuannya telah sesuai dan berkaitan dengan tupoksi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Sedangkan sasaran pada misi ke-5 (lima) yang sesuai dan berkaitan dengan tupoksi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah sasaran yang ke-1 (satu) yaitu **Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib**, dengan indikator sasarannya yaitu **persentase konflik SARA yang terselesaikan**.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Analisis Renstra Kementerian/Lembaga dan OPD Propinsi yang masih berlaku ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan OPD Propinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat terkait dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri karena Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik berada di bawah Kementerian Dalam Negeri sedangkan OPD Propinsi yang berkaitan dengan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Propinsi Lampung.

Berdasarkan analisis terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri khususnya pada Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik ada 7 program yaitu :

1. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
3. Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri
4. Program Ketahanan Ekonomi
5. Program Kewaspadaan Nasional
6. Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
7. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dirjen Kesbangpol

Adapun jumlah program yang ada pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yaitu :

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Program-program yang ada pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat hampir sama dengan program yang ada pada Kementerian Dalam Negeri tersebut.

Secara umum permasalahan yang mempengaruhi pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian ataupun Renstra Propinsi antara lain :

- a. Belum optimalnya pembinaan terhadap Ormas/LSM guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat.
- c. Masih rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.
- d. Penyampaian aspirasi oleh beberapa elemen masyarakat seringkali tanpa disadari terkontaminasi sebagai akibat di provokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
- e. Belum optimalnya pengawasan dan pemantauan terhadap orang asing maupun lembaga asing.
- f. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pulau-pulau terluar.
- g. Maraknya penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, psikotropika dan zat adiktif lainnya di kalangan pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum lainnya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengaturan tata ruang sesuai dengan peruntukan dimaksudkan untuk mengatasi krisis tata ruang yang terjadi, penataan tata ruang dalam suatu sistem yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Penataan ruang harus didukung dengan regulasi yang searah dalam arti tidak bertabrakan antar sektor dan memperhatikan aspek keberlanjutan, daya dukung lingkungan dan kerentanan wilayah terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, banjir dan tsunami.

Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, baik di masing-masing daerah maupun antar daerah. Melalui pemanfaatan potensi dan peluang keunggulan masing-masing daerah berdasarkan keunggulan lokal, dalam rangka mendukung daya saing nasional.

Tantangan terberat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup adalah kemungkinan terjadinya 3 (tiga) ancaman, yakni : krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. Oleh karena itu perlu upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam daratan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan.

Tantangan yang rill di daerah adalah kerusakan hutan dan berbagai bentuk alih fungsi kawasan hutan untuk berbagai kepentingan sampai pada taraf yang membahayakan, serta adanya degradasi kawasan hutan dan lahan budidaya yang mengakibatkan perbedaan debit air sungai pada musim hujan dan musim kemarau yang cukup besar. Tantangan terbesar lain adalah bagaimana mengarahkan akses kegiatan ekonomi masyarakat ke hutan konservasi dan hutan lindung agar menjadi tumbuh dan lestari.

Kondisi hidrologis yang terus memburuk memberikan ancaman terjadinya kekurangan air yang serius pada musim kemarau dan menyebabkan banjir pada musim hujan serta kecenderungan pemanfaatan air tanah tanpa memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutan yang berakibat pada menurunnya ketahanan air tanah. Pada sisi lain pengembangan industri dapat mengakibatkan penurunan kualitas air di perairan umum dan pencemaran perairan di wilayah laut.

Proses pemanasan global dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap aktivitas dan kehidupan manusia serta kelestarian plasma nutfah lokal. Selain itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkembang secara optimal sehingga belum dapat menghasilkan nilai tambah sebagai alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati. Adanya ancaman global diberlakukannya ekolabel bagi produk- produk primer unggulan yang berbasis sumberdaya lahan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila

tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat antara lain :

1. Masuknya era globalisasi yang berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat.
2. Menjelang dan pasca pelaksanaan pemilihan umum, baik itu pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan umum Legislatif dan pemilihan umum Presiden, serta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati, suhu politik di kalangan masyarakat, Ormas/LSM dan Partai Politik akan meningkat sehingga rentan terjadinya konflik/benturan-benturan antar kelompok masyarakat.
3. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kehidupan demokrasi terutama dalam hal penyampaian aspirasi seringkali menjurus pemaksaan kehendak, hal ini dapat menjadi potensi terjadinya konflik dan gejolak sosial.
4. Budaya politik yang dilandasi oleh moral dan etika politik masih perlu dimantapkan, sehubungan dengan adanya kecenderungan merosotnya moral dan etika dalam artikulasi politik baik di tingkat elite maupun massa, diwarnai dengan peningkatan perilaku agresif pada masyarakat, berupa penyampaian tuntutan dengan tuntutan dengan penggalangan massa, perusakan, main hakim sendiri dan kecenderungan meningkatnya pelanggaran terhadap tatanan kehidupan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kebebasan yang dinamik melalui momentum reformasi seakan berjalan tanpa arah, karenanya perlu di dayagunakan menjadi sumber daya kreatifitas dan sumber daya cipta yang positif, agar tetap mendukung eksistensi negara kesatuan yang demokratis dan bermuara pada tegaknya kedaulatan rakyat yang berkeadilan dan beradab.

Berdasarkan isu-isu penting tersebut diatas, masalah mendesak Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah :

1. Pemeliharaan stabilitas kehidupan sosial politik yang dinamis dalam mendorong partisipasi dan kehidupan demokrasi di daerah dengan membuka komunikasi dan integrasi sosial politik baik vertikal maupun horizontal dengan semua elemen masyarakat.
2. Peningkatan kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa sebagai kesatuan pikir dan tindak bagi seluruh komponen pembangunan di Kabupaten Lampung Barat
3. Perlunya pendataan dan pembinaan LSM, Ormas, Organisasi Politik serta Organisasi Masyarakat lainnya, dalam rangka pembinaan dan pemantapan wawasan kebangsaan serta menciptakan hubungan yang harmonis antar lembaga.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, yang akan menjadi arah perjalanan pemerintahan dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria, aksesibilitas dan kewenangan yang mudah dipahami seluruh masyarakat. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan merupakan penjabaran Misi. Tujuan harus searah dengan Visi dan Misi organisasi, jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang serta menunjukkan secara jelas arah program.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumberdaya, program dan kegiatan. Agar efektif, sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, menantang, namun dapat dicapai, dan berorientasi pada hasil. Sasaran operasional tahunan ialah pernyataan tentang hal-hal yang diharapkan oleh setiap unit organisasi dalam peranannya terhadap pencapaian visi dan misi pemerintah daerah yang telah ditetapkan.

Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 yaitu :

“TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA”.

Guna mewujudkan Visi tersebut, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan beberapa Misi dimana dalam penetapannya mengacu pada Misi 5 (lima) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 yaitu **Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.**

Sesuai dengan Misi 5 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang telah dirumuskan di atas, maka Tujuan yang ingin dicapai adalah:

“Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib”.

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai tersebut diatas, maka Sasaran Strategis dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan.
2. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik.

Adapun untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan langkah-langkah taktis yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan tersebut nantinya menjadikan pilihan strategi menjadi rasional dan konkret sehingga pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan.

Komposisi perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang siap aksi mampu diimplementasikan dan diwujudkan. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

Agar strategi yang telah disepakati dapat berjalan, maka dibutuhkan komitmen. Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam menjadikan strategi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah adalah:

1. Menerjemahkan strategi ke dalam bentuk yang operasional;
2. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah;
3. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi;
4. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan; dan
5. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik.

Strategi dan kebijakan disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi. Organisasi bertanggungjawab dalam mencapai sasaran-sasaran strategis sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian program prioritas, selain bertanggungjawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya itu sendiri.

Arah Kebijakan dan Strategi organisasi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Strategi kebijakan dan pendanaan organisasi merupakan uraian yang bersifat lengkap, tidak hanya mencakup yang dilakukan langsung oleh organisasi, tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan peran daerah dan swasta berikut pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Sesuai dengan Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat tersebut diatas, maka Strategi yang akan dilaksanakan antara lain :

- a. Melaksanakan pembinaan melalui penyuluhan, sosialisasi dan pendidikan kepada aparatur dan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- b. Pemantapan peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah dan pembangunan.
- c. Meningkatkan kualitas SDM, sarana prasarana, koordinasi dan pembinaan di bidang pendidikan politik masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, maka kebijakan yang ditetapkan adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta mendorong terciptanya kerukunan hidup antar berbagai kelompok agama, suku dan budaya.

- b. Meningkatkan kualitas dan peran organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah.
- c. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan permasalahan aktual yang meliputi ATHG di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum melalui pendidikan budaya dan etika politik

Adapun untuk lebih jelasnya mengenai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada Tabel 5.1 di bawah ini.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh organisasi.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Guna mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat serta berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan, maka program-program yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
6. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
7. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan program-program tersebut adalah :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor

7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12. Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
15. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
16. Pengadaan meubeleurnya
17. Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
18. Pengadaan Alat-alat Studio
19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
22. Pengadaan Alat-alat Komunikasi
23. Pendidikan dan Pelatihan Formal
24. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
25. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
26. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
27. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
28. Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
29. Pengelolaan Keuangan Daerah
30. Penetapan Renstra OPD 2017-2022
31. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
32. Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Premanisme
33. Dialog Interaktif Peningkatan Kesadaran Bela Negara
34. Rapat Koordinasi Tim Pemantau Kunjungan Tamu Luar Daerah/Orang Asing (WNA)
35. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
36. Forum Silaturahmi dan Pembinaan ORMAS/LSM Kab. Lampung Barat
37. Penyusunan Data Base Kesbang dan Politik
38. Tes Urine bagi Pejabat dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
39. Penyediaan Jasa Pendukung Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA)

40. Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
41. Sosialisasi dan Pelatihan Satgas Anti Narkotika
42. Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lampung Barat
43. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah
44. Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik
45. Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Bantuan Keuangan Partai Politik
46. Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik
47. Tim Desk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat
48. Tim Desk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung
49. Tim Desk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden

Adapun untuk lebih jelasnya mengenai program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat untuk Tahun 2017 – 2022 beserta indikator kinerjanya, dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan informasi kinerja (outputs, outcomes dan impacts). Indikator kinerja program dalam kerangka Akuntabilitas Organisasi merupakan ukuran pencapaian outcome/kinerja program.

Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Outcome dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi. Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program. Indikator kinerja kegiatan dalam kerangka akuntabilitas organisasi merupakan ukuran pencapaian output/kinerja keluaran.

Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator kinerja. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh organisasi, program, dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat menggambarkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun indikator kinerja utama (IKU) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD antara lain :

- 1. Persentase gejala konflik yang dapat diatasi.**
- 2. Persentase cakupan wilayah rawan konflik.**
- 3. Jumlah kelompok masyarakat yang memenuhi syarat legalitas.**
- 4. Persentase kasus terkait politik yang diselesaikan.**

Adapun untuk lebih jelasnya mengenai indikator kinerja utama (IKU) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk Tahun 2017 – 2022 dapat dilihat pada Tabel 7.1 di bawah ini.

BAB VIII **P E N U T U P**

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan yang baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran. Komponen Perencanaan Strategis mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022 yang memuat visi, misi dan strategi utama, serta menjadi komitmen Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyusunan Renstra OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat bertujuan untuk merumuskan agenda-agenda jangka menengah Kantor Kesbang dan Politik dalam periode Tahun 2017 - 2022. Program kerja dirumuskan menurut skala prioritas, jelas dan terukur, sehingga pada gilirannya *output* dan *outcome* pelaksanaan program diharapkan dapat berkontribusi secara nyata dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional secara menyeluruh. Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik juga ditujukan sebagai panduan penyelenggara kegiatan agar tetap dalam koridor visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai oleh Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Untuk mewujudkan visinya, dibutuhkan peran aktif para stakeholder sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan perangkat daerah. Dengan adanya Rencana Strategis Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap pejabat di lingkungan Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini mengingat bahwa keberhasilan

setiap pelaksanaan program/kegiatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak. Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan Renstra ini dengan sebaik-baiknya dengan menjabarkannya lebih lanjut ke dalam rencana tindak operasional bagi setiap sub bagian/seksi di lingkungan Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Rencana Strategis Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Barat merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Kantor Kesbang dan Politik untuk lima tahun mendatang sampai tahun 2022. Renstra juga disusun tidak saja sebagai pedoman dalam perencanaan tahunan tetapi juga dijadikan pedoman dasar dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan selama lima tahun ke depan. Supaya Renstra yang telah disusun dapat mendatangkan manfaat bagi kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perlu dioperasionalkan dan dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi dan konsisten yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap aparatur Kantor Kesbang dan Politik. Keberhasilan akan seluruh program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik hanya akan terwujud bila seluruh sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dapat dilakukan salah satunya melalui pengusulan menjadi peserta Diklat, khususnya yang berkaitan dengan Tupoksi. Serta dengan melaksanakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana yang akan menunjang tugas dan fungsi untuk melengkapi sarana dan prasarana yang kurang memadai tersebut.

Anggaran kegiatan diharapkan dapat turun secara tepat waktu agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Perlu melakukan inovasi-inovasi baru serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja. Selain itu juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi di internal Kantor Kesbang dan Politik yang melibatkan seluruh unsur secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kesbang dan Politik.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Tulip No. 2 Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon (0728) 21164 Faks. (0728) 21164

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 050 / / KPTS / IV.06 / 2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 - 2022

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi, misi, tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022, perlu disusun Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010;

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022 merupakan dokumen perencanaan operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017- 2022.
- KEDUA : Renstra Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 - 2022 adalah dokumen perencanaan jangka menengah dimana dalam penyusunannya bertujuan untuk merumuskan agenda-agenda jangka menengah Kantor Kesbang dan Politik dalam periode Tahun 2017 - 2022.
- KETIGA : Renstra Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Barat akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja serta Rencana Kerja Anggaran (RKA). Oleh karena itu Renstra ini memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Barat untuk jangka waktu lima tahun kedepan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Liwa
Pada Tanggal : 15 Agustus 2017

KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

R A S W A N, SH., MM.
PEMBINA TK. I
NIP. 19630725 198603 1 018

Tembusan :

1. Bapak Bupati/Wakil Bupati Lampung Barat
2. Kepala Bappeda Lampung Barat
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
3. Arsip

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**



INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN TAHUN 2012 - 2017

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		2 0 1 6		2 0 1 7		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor			176,603,000		176,603,000		176,603,000		176,603,000		176,603,000		883,015,000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat-menyurat		100%	3,500,000	100%	3,500,000	100%	3,500,000	100%	3,500,000	100%	3,500,000	100%	17,500,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya fasilitas komunikasi, sumber daya air dan listrik		100%	10,800,000	100%	10,800,000	100%	10,800,000	100%	10,800,000	100%	10,800,000	100%	54,000,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tertibnya administrasi kendaraan dinas		100%	1,103,000	100%	1,103,000	100%	1,103,000	100%	1,103,000	100%	1,103,000	100%	5,515,000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tertibnya administrasi keuangan		90%	500,000	90%	500,000	90%	500,000	90%	500,000	90%	500,000	90%	2,500,000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya pelayanan kebersihan kantor		100%	6,500,000	100%	6,500,000	100%	6,500,000	100%	6,500,000	100%	6,500,000	100%	32,500,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		100%	11,000,000	100%	11,000,000	100%	11,000,000	100%	11,000,000	100%	11,000,000	100%	55,000,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan		100%	29,200,000	100%	29,200,000	100%	29,200,000	100%	29,200,000	100%	29,200,000	100%	146,000,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik		100%	6,500,000	100%	6,500,000	100%	6,500,000	100%	6,500,000	100%	6,500,000	100%	32,500,000
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya informasi media massa		100%	3,600,000	100%	3,600,000	100%	3,600,000	100%	3,600,000	100%	3,600,000	100%	18,000,000
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum		100%	11,400,000	100%	11,400,000	100%	11,400,000	100%	11,400,000	100%	11,400,000	100%	57,000,000
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		100%	65,000,000	100%	65,000,000	100%	65,000,000	100%	65,000,000	100%	65,000,000	100%	325,000,000
12	Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran	Terlaksananya pameran dan publikasi		100%	6,500,000	100%	6,500,000	100%	6,500,000	100%	6,500,000	100%	6,500,000	100%	32,500,000
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah		100%	21,000,000	100%	21,000,000	100%	21,000,000	100%	21,000,000	100%	21,000,000	100%	105,000,000
B	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			61,240,000		136,240,000		126,240,000		141,240,000		141,240,000		606,200,000
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya sarana perlengkapan kantor		-	0	90%	20,000,000	90%	20,000,000	90%	20,000,000	90%	20,000,000	90%	80,000,000
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya sarana peralatan gedung kantor		-	0	90%	10,000,000	90%	10,000,000	90%	10,000,000	90%	10,000,000	90%	40,000,000
3	Pengadaan Meubeler	Tersedianya meubeler kantor		-	0	90%	20,000,000	90%	20,000,000	90%	20,000,000	90%	20,000,000	90%	80,000,000
4	Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer	Tersedianya komputer/laptop		90%	5,000,000	90%	20,000,000	90%	20,000,000	90%	25,000,000	90%	25,000,000	90%	95,000,000
5	Pengadaan Alat-Alat Studio	Tersedianya alat studio		-	0	90%	10,000,000	-	0	90%	10,000,000	90%	10,000,000	90%	30,000,000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor		90%	9,000,000	90%	9,000,000	90%	9,000,000	90%	9,000,000	90%	9,000,000	90%	45,000,000
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas		90%	41,240,000	90%	41,240,000	90%	41,240,000	90%	41,240,000	90%	41,240,000	90%	206,200,000
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor		90%	6,000,000	90%	6,000,000	90%	6,000,000	90%	6,000,000	90%	6,000,000	90%	30,000,000
C	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			13,000,000		13,000,000		13,000,000		13,000,000		13,000,000		65,000,000
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kursus dan pelatihan bagi aparatur		90%	13,000,000	90%	13,000,000	90%	13,000,000	90%	13,000,000	90%	13,000,000	90%	65,000,000
D	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			11,500,000		11,500,000		11,500,000		11,500,000		11,500,000		57,500,000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		2 0 1 6		2 0 1 7		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya laporan kinerja SKPD		80%	1,000,000	100%	1,000,000	100%	1,000,000	100%	1,000,000	100%	1,000,000	100%	5,000,000
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Terwujudnya laporan keuangan semesteran		80%	1,000,000	100%	1,000,000	100%	1,000,000	100%	1,000,000	100%	1,000,000	100%	5,000,000
3	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Terwujudnya laporan prognosis realisasi anggaran		80%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	10,000,000
4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun		90%	2,500,000	100%	2,500,000	100%	2,500,000	100%	2,500,000	100%	2,500,000	100%	12,500,000
5	Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	Terwujudnya evaluasi dan laporan dokumen perencanaan		100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	25,000,000
E	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Terciptanya Stabilitas Politik yang Dinamis di Daerah	10.00%	30.00%	83,540,000	17.02%	253,540,000	17.02%	253,540,000	17.98%	283,500,000	17.98%	283,500,000	100.00%	1,157,620,000
1	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan	-	-	0	600 orang Peserta	170,000,000	600 orang Peserta	170,000,000	700 orang Peserta	195,500,000	700 orang Peserta	195,500,000	2.600 orang Peserta	731,000,000
2	Pemantauan Kunjungan Tamu Luar Daerah/Orang Asing (WNA)	Terlaksananya pemantauan kepada orang asing (WNA)	12 kali	12 kali	42,600,000	12 kali	42,600,000	12 kali	42,600,000	12 kali	45,000,000	12 kali	45,000,000	60 kali	217,800,000
3	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Pusat Komunikasi dan Informasi Daerah (PUSKOMIN)	Terlaksananya komunikasi dan informasi yang menunjang stabilitas politik di daerah	12 kali	12 kali	40,940,000	-	0	-	0	-	0	-	0	12 kali	40,940,000
4	Fasilitasi Pusat Komunikasi dan Informasi Daerah (PUSKOMIN)	Terlaksananya komunikasi dan informasi yang menunjang stabilitas politik di daerah	-	-	0	12 kali	40,940,000	12 kali	40,940,000	12 kali	43,000,000	12 kali	43,000,000	48 kali	167,880,000

0

F	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Meningkatnya Peran Serta Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Pembangunan Daerah	2.86%	22.75%	331,830,000	19.18%	376,430,000	19.18%	376,430,000	19.18%	393,430,000	19.73%	396,430,000	100.00%	1,874,550,000
1	Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Terlaksananya pengurusan FPK	-	100 orang Peserta	30,400,000	-	0	-	0	-	0	-	0	100 orang Peserta	30,400,000
2	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Terlaksananya sekretariat FPK	-	-	0	12 kali	20,000,000	12 kali	20,000,000	12 kali	25,000,000	12 kali	25,000,000	48 kali	90,000,000
3	Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Terbentuknya FKDM	-	5 (lima) kecamatan	35,000,000	5 (lima) kecamatan	35,000,000	5 (lima) kecamatan	35,000,000	5 (lima) kecamatan	42,000,000	6 (enam) kecamatan	45,000,000	26 kecamatan	192,000,000
4	Penyediaan Jasa Pendukung Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	Terlaksananya forum komunikasi dan koordinasi unsur inteligen dan unsur pimpinan daerah	12 kali	12 kali	180,430,000	12 kali	180,430,000	12 kali	180,430,000	12 kali	180,430,000	12 kali	180,430,000	60 kali	902,150,000
5	Forum Silaturahmi dan Pembinaan ORMAS/LSM Kabupaten Lampung Barat	Terciptanya suasana harmonis dan terbinanya ORMAS/LSM	-	250 orang Peserta	86,000,000	250 orang Peserta	86,000,000	250 orang Peserta	86,000,000	250 orang Peserta	86,000,000	250 orang Peserta	86,000,000	1.250 orang Peserta	430,000,000
6	Fasilitasi ORMAS/LSM Kabupaten Lampung Barat	Terlaksananya pembinaan terhadap ORMAS/LSM Kabupaten Lampung Barat	-	-	0	12 kali	30,000,000	12 kali	30,000,000	12 kali	35,000,000	12 kali	35,000,000	48 kali	130,000,000
7	Penyusunan Data Base Kesbang dan Politik	Tersedianya data base kesbang dan politik	-	-	0	100 buku	25,000,000	100 buku	25,000,000	100 buku	25,000,000	100 buku	25,000,000	400 buku	100,000,000
G	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	27.27%	38.18%	399,000,000	24.55%	508,500,000	6.36%	240,000,000	6.36%	250,000,000	24.55%	489,000,000	100.00%	1,886,500,000
1	Penyediaan Jasa DESK PEMILU BUPATI dan WAKIL BUPATI LAMPUNG BARAT PUTARAN 1 (SATU)	Terlaksananya Tim DESK Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat	1 (satu) Tim DESK	-	0	-	0	-	0	-	0	1 (satu) Tim DESK	169,000,000	1 (satu) Tim DESK	169,000,000
2	Penyediaan Jasa DESK PEMILU BUPATI dan WAKIL BUPATI LAMPUNG BARAT PUTARAN 2 (DUA)	Terlaksananya Tim DESK Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat	1 (satu) Tim DESK	-	0	-	0	-	0	-	0	1 (satu) Tim DESK	70,000,000	1 (satu) Tim DESK	70,000,000
3	Penyediaan Jasa DESK PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG PUTARAN 1 (SATU)	Terlaksananya Tim DESK Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung	-	1 (satu) Tim DESK	169,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	1 (satu) Tim DESK	169,000,000
4	Penyediaan Jasa DESK PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG PUTARAN 2 (DUA)	Terlaksananya Tim DESK Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung	-	1 (satu) Tim DESK	70,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	1 (satu) Tim DESK	70,000,000
5	Penyediaan Jasa DESK PEMILU LEGISLATIF dan PEMILU PRESIDEN	Terlaksananya Tim DESK Pemilu Legislatif dan dan Pemilu Presiden	-	-	0	1 (satu) Tim DESK	200,000,000	-	0	-	0	-	0	1 (satu) Tim DESK	200,000,000
6	Penyediaan Jasa DESK PEMILU PRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN PUTARAN 2 (DUA)	Terlaksananya Tim DESK Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	-	-	0	1 (satu) Tim DESK	70,000,000	-	0	-	0	-	0	1 (satu) Tim DESK	70,000,000
7	Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik	Meningkatnya pengetahuan undang-undang bidang politik	-	260 orang Peserta	118,500,000	260 orang Peserta	118,500,000	260 orang Peserta	120,000,000	260 orang Peserta	120,000,000	260 orang Peserta	120,000,000	1.300 orang Peserta	597,000,000
8	Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Bantuan Keuangan Partai Politik	Terciptanya administrasi keuangan bagi parpol penerima bantuan keuangan	1 (satu) kali	1 (satu) kali	25,500,000	-	0	-	0	-	0	-	0	1 (satu) kali	25,500,000
9	Pelatihan bagi Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan	Meningkatnya pengetahuan administrasi keuangan bagi pengurus partai politik	-	34 orang Peserta	16,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	34 orang Peserta	16,000,000
10	Fasilitasi Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan	Terlaksananya pembinaan terhadap partai politik	-	-	0	12 kali	45,000,000	12 kali	45,000,000	12 kali	50,000,000	12 kali	50,000,000	48 kali	190,000,000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2012)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		2 0 1 6		2 0 1 7		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		penerima bantuan keuangan													
11	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Terlaksananya Dialog Politik	-	-	0	200 orang Peserta	75,000,000	200 orang Peserta	75,000,000	200 orang Peserta	80,000,000	200 orang Peserta	80,000,000	800 orang Peserta	310,000,000
	TOTAL				1,076,713,000		1,475,813,000		1,197,313,000		1,269,273,000		1,511,273,000		6,530,385,000

KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN 2008 - 2012

NO	KEGIATAN	TARGET/PESERTA	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5
TAHUN 2008			679,208,200	630,533,200
1	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	250 orang	33,134,500	31,554,500
2	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung PUSKOMIN	12 kali	25,817,250	25,386,250
3	Penyediaan Jasa Pendukung KOMINDA	12 kali	98,845,000	88,895,000
4	Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Bantuan Keuangan Politik	1 kali	2,922,000	2,922,000
5	Forum Silaturahmi dan Pembinaan ORMAS/LSM Kabupaten Lampung Barat	100 orang	12,306,500	12,156,500
6	Penyediaan Jasa DESK Pemilu GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR LAMPUNG	1 (satu) Tim DESK	88,428,500	87,823,500
7	Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana Alam	62 orang	162,542,700	162,378,700
8	Gelar Pasukan dan Penyerahan Linmas Pengamanan Pilkada		67,167,000	66,747,000
9	Penyediaan Jasa Linmas Pengamanan Pilkada		103,087,750	101,352,750
10	Pelatihan Evakuasi Air dan Penyelamatan Dasar Bagi Satgas PB	10 orang	35,578,500	35,428,500
11	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Satuan Pelaksana PB		23,728,500	15,888,500
12	Penyediaan Jasa Piket Antisipasi Bencana Alam		25,650,000	0
TAHUN 2009			826,989,500	790,576,600
1	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung PUSKOMIN	12 kali	40,306,500	32,512,500
2	Penyediaan Jasa Pendukung KOMINDA	12 kali	198,236,500	186,881,125
3	Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Bantuan Keuangan Politik	1 kali	10,000,000	10,000,000
4	Pelatihan Bagi Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan	68 orang	27,500,000	23,529,000
5	Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik 5 kec (SUKAU, BALIK BUKIT, BELALAU, SEKINCAU, W. TENONG)	500 orang	100,000,000	90,223,200
6	Penyediaan Jasa DESK Pemilu (Legislatif dan Pemilu Presiden)		143,587,500	140,806,650
7	Gelar Pasukan Pemilu	850 orang	120,000,000	119,920,000
8	Penyediaan Jasa Linmas Pengaman Pemilu	370+85=455 orang PPS dan PPK	187,359,000	186,704,125
TAHUN 2010			238,103,125	223,205,025
1	Pemantauan Kunjungan Tamu Luar Daerah/Orang Asing (WNA)	12 kali	10,940,000	10,415,000
2	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung PUSKOMIN	12 kali	40,306,500	35,880,900
3	Penyediaan Jasa Pendukung KOMINDA	12 kali	176,856,625	166,909,125
4	Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Bantuan Keuangan Politik	1 kali	10,000,000	10,000,000
TAHUN 2011			488,861,000	482,169,300
1	Pemantauan Kunjungan Tamu Luar Daerah/Orang Asing (WNA)	12 kali	31,217,000	29,896,500
2	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung PUSKOMIN	12 kali	40,306,000	38,676,000
3	Penyediaan Jasa Pendukung KOMINDA	12 kali	166,659,000	165,231,800
4	Pendataan ORMAS/LSM Kabupaten Lampung Barat		16,936,000	16,298,000
5	Sosialisasi Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	50 orang	17,675,000	17,668,000
6	Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Bantuan Keuangan Politik	1 kali	19,622,000	18,997,000
7	Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik	500 orang	196,446,000	195,402,000

TAHUN 2012			460,754,000	392,261,700
1	Pemantauan Kunjungan Tamu Luar Daerah/Orang Asing (WNA)	12 kali	32,244,000	29,863,500
2	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung PUSKOMIN	12 kali	40,919,000	40,797,500
3	Penyediaan Jasa Pendukung KOMINDA	12 kali	166,659,000	164,809,200
4	Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Bantuan Keuangan Politik	1 kali	20,466,000	20,326,000
5	Penyediaan Jasa DESK Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat Putaran 1	1 (satu) Tim DESK	144,391,000	136,465,500
6	Penyediaan Jasa DESK Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat Putaran 2	1 (satu) Tim DESK	56,075,000	0

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi negara di Kabupaten Lampung Barat			100.00%	45.60%	59.20%	72.80%	86.40%	100.00%	0.00%	0.00%	33.33%	33.33%	33.33%	0.00%	0.00%	45.79%	38.58%	33.33%
1	Jumlah peserta sosialisasi	-	-	600 orang peserta	-	-	200 orang peserta	200 orang peserta	200 orang peserta	-	-	200 orang peserta	200 orang peserta	200 orang peserta	-	-	100.00%	100.00%	100.00%
2	Lama waktu pemantauan WNA	-	-	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
3	Jumlah operasional PUSKOMIN	-	-	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-
4	Jumlah operasional PUSKOMIN	-	-	48 bulan	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	-	-	-	100.00%	100.00%	-	-
5	Jumlah peserta sosialisasi	-	-	300 orang peserta	-	-	100 orang peserta	100 orang peserta	100 orang peserta	-	-	100 orang peserta	100 orang peserta	100 orang peserta	-	-	100.00%	100.00%	100.00%
6	Jumlah peserta dialog interaktif	-	-	200 orang peserta	-	-	-	100 orang peserta	100 orang peserta	-	-	-	100 orang peserta	100 orang peserta	-	-	-	100.00%	100.00%
B	Persentase pertumbuhan dan perkembangan Ormas dan LSM			100.00%	50.86%	63.15%	75.44%	87.73%	100.00%	-22.36%	-0.80%	94.35%	21.99%	13.27%	-43.96%	-1.27%	125.07%	25.07%	13.27%
1	Jumlah peserta sosialisasi dan pembentukan	-	-	200 orang peserta	100 orang peserta	-	-	-	100 orang peserta	100 orang peserta	-	-	-	100 orang peserta	100.00%	-	-	-	100.00%
2	Jumlah operasional FPK	-	-	48 bulan	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	-	-	-	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
3	Jumlah FKDM yang terbentuk	-	-	15 kecamatan	5 kecamatan	5 kecamatan	5 kecamatan	-	-	5 kecamatan	5 kecamatan	5 kecamatan	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
4	Jumlah FKDM yang terfasilitasi	-	-	FKDM Kabupaten	-	-	-	-	FKDM Kabupaten	-	-	-	-	FKDM Kabupaten	-	-	-	-	100.00%
5	Jumlah operasional KOMINDA	-	-	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
6	Jumlah peserta forum silaturahmi	-	-	1.250 orang peserta	250 orang peserta	250 orang peserta	250 orang peserta	250 orang peserta	250 orang peserta	250 orang peserta	250 orang peserta	250 orang peserta	250 orang peserta	250 orang peserta	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
7	Jumlah dokumen data base Kesbangpol	-	-	400 buku	-	100 buku	100 buku	100 buku	100 buku	-	100 buku	100 buku	100 buku	100 buku	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
8	Jumlah operasional tim terpadu			48 bulan	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	9 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	75.00%	100.00%	100.00%	100.00%
9	Jumlah PNS yang mengikuti tes urine	-	-	3.889 orang peserta	-	-	703 orang peserta	1.100 orang peserta	2.086 orang peserta	-	-	690 orang peserta	1.068 orang peserta	626 orang peserta	-	-	98.15%	97.09%	30.11%
10	Jumlah peserta pembentukan satgas	-	-	3.162 orang peserta	-	-	-	3.162 orang peserta	-	-	-	-	3.162 orang peserta	-	-	-	-	100.00%	-
11	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan	-	-	789 orang peserta	-	-	-	-	789 orang peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
12	Jumlah buku ranperda	-	-	150 buku	-	-	-	150 buku	-	-	-	-	0 buku	-	-	-	-	0.00%	-
C	Persentase partai politik yang difasilitasi			100.00%	67.94%	75.95%	83.96%	91.97%	100.00%	50.00%	50.00%	83.33%	83.33%	76.92%	73.59%	65.83%	99.25%	90.61%	76.92%
1	Jumlah operasional tim koordinasi dan fasilitasi pemilu	-	-	9 bulan	-	-	-	6 bulan	3 bulan	-	-	-	6 bulan	3 bulan	-	-	-	100.00%	100.00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Jumlah operasional tim koordinasi dan fasilitasi pemilu	-	-	6 bulan	-	6 bulan	-	-	-	-	6 bulan	-	-	-	-	100.00%	-	-	-
3	Jumlah operasional tim desk pemilu	-	-	6 bulan	-	6 bulan	-	-	-	-	6 bulan	-	-	-	-	100.00%	-	-	-
4	Jumlah peserta sosialisasi	-	-	860 orang peserta	260 orang peserta	-	-	300 orang peserta	300 orang peserta	260 orang peserta	-	-	300 orang peserta	300 orang peserta	100.00%	-	-	100.00%	100.00%
5	Jumlah operasional tim pemeriksa persyaratan bantuan partai politik	-	-	1 (satu) kali	1 (satu) kali	-	-	-	-	1 (satu) kali	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-
6	Jumlah peserta pelatihan	-	-	34 orang peserta	34 orang peserta	-	-	-	-	34 orang peserta	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-
7	Jumlah operasional tim fasilitasi partai politik	-	-	48 bulan	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
8	Jumlah peserta diskusi politik	-	-	800 orang peserta	-	200 orang peserta	200 orang peserta	200 orang peserta	200 orang peserta	-	-	200 orang peserta	200 orang peserta	200 orang peserta	-	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Barat

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN																	
	Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri																	
A	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	83,540,000	83,100,000	196,559,200	183,702,000	186,320,000	79,543,450	82,712,100	178,844,000	173,400,500	176,087,000	95.22%	99.53%	90.99%	94.39%	94.51%	25,695,000	24,135,888
1	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	0	0	59,121,000	53,531,000	54,761,000	0	0	58,954,900	53,476,000	54,306,000			99.72%	99.90%	99.17%	(1,090,000)	(1,162,225)
2	Pemantauan Kunjungan Tamu Luar Daerah/Orang Asing (WNA)	42,600,000	42,600,000	42,630,000	39,066,000	39,200,000	39,018,550	42,553,200	38,723,500	37,668,500	37,512,000	91.59%	99.89%	90.84%	96.42%	95.69%	(850,000)	(376,638)
3	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Pusat Komunikasi dan Informasi Daerah (PUSKOMIN)	40,940,000	0	0	0	0	40,524,900	0	0	0	0	98.99%					(10,235,000)	(10,131,225)
4	Fasilitasi Pusat Komunikasi dan Informasi daerah (PUSKOMIN)	0	40,500,000	40,600,000	0	0	0	40,158,900	37,596,400	0	0		99.16%	92.60%			25,000	(640,625)
5	Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Premanisme	0	0	54,208,200	46,225,000	46,849,000	0	0	43,569,200	44,891,000	39,449,000			80.37%	97.11%	84.20%	(1,839,800)	(1,030,050)
6	Dialog Interaktif Peningkatan Kesadaran Bela Negara	0	0	0	44,880,000	45,510,000	0	0	0	37,365,000	44,820,000				83.26%	98.48%	157,500	1,863,750
B	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	331,830,000	237,626,800	566,807,500	1,039,502,500	568,559,000	319,153,050	212,819,450	513,520,800	887,443,300	554,766,000	96.18%	89.56%	90.60%	85.37%	97.57%	59,182,250	58,903,238
1	Sosialisasi dan Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	30,400,000	0	0	0	28,199,000	30,348,000	0	0	0	28,170,000	99.83%				99.90%	(550,250)	(544,500)
2	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	0	15,481,200	17,550,000	0	0	0	15,481,200	15,770,000	0	0		100.00%	89.86%			517,200	72,200
3	Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	35,000,000	33,125,600	33,100,000	0	0	32,263,750	32,550,000	32,982,000	0	0	92.18%	98.26%	99.64%			(475,000)	179,563
4	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	0	0	0	0	30,902,000	0	0	0	0	30,727,000					99.43%	7,725,500	7,681,750
5	Penyediaan Jasa Pendukung Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	180,430,000	0	139,875,500	114,843,000	115,155,000	171,444,600	0	114,220,000	110,509,000	114,071,000	95.02%		81.66%	96.23%	99.06%	(16,318,750)	(14,343,400)
6	Forum Silaturahmi dan Pembinaan ORMAS/LSM Kabupaten Lampung Barat	86,000,000	74,000,000	73,900,000	65,620,000	87,150,000	85,096,700	73,360,000	73,817,000	65,225,000	85,410,000	98.95%	99.14%	99.89%	99.40%	98.00%	287,500	78,325
7	Penyusunan Data Base Kesbang dan Politik	0	14,050,000	14,100,000	15,553,000	15,553,000	0	13,695,400	13,990,000	13,795,000	15,372,000		97.48%	99.22%	88.70%	98.84%	375,750	419,150
8	Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Lampung Barat	0	100,970,000	108,538,000	102,688,000	103,153,000	0	77,732,850	91,433,800	96,739,000	96,464,000		76.99%	84.24%	94.21%	93.52%	545,750	4,682,788
9	Tes Urine bagi Pejabat dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	0	0	179,744,000	254,921,000	188,447,000	0	0	171,308,000	252,483,000	184,552,000			95.31%	99.04%	97.93%	2,175,750	3,311,000
10	Pembentukan Satgas Anti Narkotika	0	0	0	362,389,500	0	0	0	0	344,774,300	0				95.14%		(90,597,375)	(86,193,575)
11	Sosialisasi dan Pelatihan Satgas Anti Narkotika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0
12	Penyusunan Ranperda Kabupaten Lampung Barat tentang Narkotika	0	0	0	123,488,000	0	0	0	0	3,918,000	0				3.17%		(30,872,000)	(979,500)
C	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	160,000,000	245,182,600	121,314,000	328,227,700	437,356,000	153,771,350	244,068,300	115,989,000	300,176,000	431,509,900	96.11%	99.55%	95.61%	91.45%	98.66%	69,339,000	69,434,638
1	Penyediaan Jasa Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat	0	0	0	97,600,700	202,291,000	0	0	0	87,300,000	201,930,400				89.45%	99.82%	26,172,575	28,657,600

No	U r a i a n	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Penyediaan Jasa Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung	0	54,232,000	0	0	0	0	54,116,000	0	0	0		99.79%				(13,558,000)	(13,529,000)
3	Penyediaan Jasa Desk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden	0	145,100,400	0	0	0	0	144,602,100	0	0	0		99.66%				(36,275,100)	(36,150,525)
4	Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik	118,500,000	0	0	120,097,000	121,700,000	114,607,350	0	0	103,098,000	121,264,500	96.72%			85.85%	99.64%	800,000	1,664,288
5	Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Bantuan Keuangan Partai Politik	25,500,000	0	0	0	0	25,500,000	0	0	0	0	100.00%					(6,375,000)	(6,375,000)
6	Pelatihan bagi Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan	16,000,000	0	0	0	0	13,664,000	0	0	0	0	85.40%					(4,000,000)	(3,416,000)
7	Fasilitasi Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan	0	45,850,200	46,180,000	39,695,000	41,300,000	0	45,350,200	45,120,000	39,653,000	41,090,000		98.91%	97.70%	99.89%	99.49%	(1,137,550)	(1,065,050)
8	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	0	0	75,134,000	70,835,000	72,065,000	0	0	70,869,000	70,125,000	67,225,000			94.32%	99.00%	93.28%	(767,250)	(911,000)
	T O T A L	575,370,000	565,909,400	884,680,700	1,551,432,200	1,192,235,000	552,467,850	539,599,850	808,353,800	1,361,019,800	1,162,362,900	96.02%	95.35%	91.37%	87.73%	97.49%	154,216,250	152,473,763

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase konflik SARA yang terselesaikan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik	Persentase kasus konflik terkait politik yang terselesaikan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Barat

No	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan VISI : TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA			
	MISI 5 : Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.			
	T u j u a n	S a s a r a n	S t r a t e g i	A r a h K e b i j a k a n
1	Tujuan 1 : Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib	Sasaran 1.1 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan	Strategi 1.1 : Melaksanakan pembinaan melalui penyuluhan, sosialisasi dan pendidikan kepada aparatur dan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik.	Arah Kebijakan 1.1 : Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta mendorong terciptanya kerukunan hidup antar berbagai kelompok agama, suku dan budaya.
			Strategi 1.2 : Pemantapan peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah dan pembangunan.	Arah Kebijakan 1.2 : Meningkatkan kualitas dan peran organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah. Arah Kebijakan 2.2 : Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan permasalahan aktual yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat.
		Sasaran 2.1 : Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik	Strategi 2.1 : Meningkatkan kualitas SDM, sarana prasarana, koordinasi dan pembinaan di bidang pendidikan politik masyarakat.	Arah Kebijakan 2.1 : Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum melalui pendidikan budaya dan etika politik.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Barat

Misi 1 : Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka menciptakan integrasi nasional yang berkesinambungan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Target										Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
					2017	2022	2018		2019		2020		2021		2022						
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13	14	7		
A	Meningkatnya keamanan di kalangan masyarakat	Angka kriminalitas	A.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun stabilitas politik yang demokratis dan dinamis	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi negara di Kabupaten Lampung Barat	33.33%	100.00%	20.00%	245,000,000	20.00%	245,000,000	20.00%	245,000,000	20.00%	245,000,000	20.00%	245,000,000	Melaksanakan pembinaan melalui penyuluhan, sosialisasi dan pendidikan kepada aparatur dan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik.	Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta mendorong terciptanya kerukunan hidup antar berbagai kelompok agama, suku dan budaya.	Terciptanya Stabilitas Politik yang Dinamis di Daerah	
				Program	Sasaran Program	Indikator Program															
			A.1.1	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun stabilitas politik yang demokratis dan dinamis	Persentase kecamatan yang menerima pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi negara	100.00%	20.00%	245,000,000	20.00%	245,000,000	20.00%	245,000,000	20.00%	245,000,000	20.00%	245,000,000				
				Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan															
			A.1.1.1	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi	200 orang peserta	1.000 orang peserta	200 orang peserta	75,000,000	200 orang peserta	75,000,000	200 orang peserta	75,000,000	200 orang peserta	75,000,000	200 orang peserta			75,000,000	Terlaksananya pemantauan kepada orang asing (WNA)
			A.1.1.2	Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Premanisme	Terlaksananya sosialisasi bahaya radikalisme, terorisme dan premanisme	Jumlah peserta sosialisasi	100 orang peserta	500 orang peserta	100 orang peserta	60,000,000	100 orang peserta	60,000,000	100 orang peserta	60,000,000	100 orang peserta	60,000,000	100 orang peserta			60,000,000	Tersosialisasinya bahaya radikalisme, terorisme dan premanisme
			A.1.1.3	Dialog Interaktif Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Terlaksananya dialog interaktif peningkatan kesadaran bela negara	Jumlah peserta dialog interaktif	100 orang peserta	500 orang peserta	100 orang peserta	60,000,000	100 orang peserta	60,000,000	100 orang peserta	60,000,000	100 orang peserta	60,000,000	100 orang peserta			60,000,000	Terlaksananya dialog interaktif
			A.1.1.4	Rapat Koordinasi Tim Pemantau Kunjungan Tamu Luar Daerah/ Orang Asing (WNA)	Terlaksananya rapat koordinasi tim pemantau kunjungan tamu luar daerah/orang asing (WNA)	Jumlah rakor	-	5 kali	1 kali	50,000,000	1 kali	50,000,000	1 kali	50,000,000	1 kali	50,000,000	1 kali			50,000,000	Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan

Misi 2 : Menciptakan pola hubungan antar lembaga yang serasi, harmonis dan seimbang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Target								Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp			
					2017	2022	2018		2019		2020		2021					2022				
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13	14	7			
B	Terbentuknya lembaga-lembaga non pemerintah yang proporsional dan mandiri	Persentase pertumbuhan dan perkembangan Ormas dan LSM di Kabupaten Lampung Barat	B.1	Meningkatnya peran serta lembaga non pemerintah dalam pembangunan daerah	Persentase pertumbuhan dan perkembangan Ormas dan LSM serta organisasi kemasyarakatan lainnya	100.00%	20.00%	1,085,000,000	20.00%	1,085,000,000	20.00%	1,085,000,000	20.00%	1,085,000,000	20.00%	1,085,000,000	Pemantapan peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah dan pembangunan.	Meningkatkan kualitas dan peran organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah.	Terciptanya Stabilitas Politik yang Dinamis di Daerah			
				Program	Sasaran Program	Indikator Program																
			B.1.1	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Meningkatnya peran serta lembaga non pemerintah dalam pembangunan daerah	Persentase pertumbuhan dan perkembangan Ormas dan LSM di Kabupaten Lampung Barat	100.00%	20.00%	1,085,000,000	20.00%	1,085,000,000	20.00%	1,085,000,000	20.00%	1,085,000,000	20.00%				1,085,000,000	Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan permasalahan aktual yang meliputi ATHG di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masvarakat,	Meningkatnya peran serta lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam pembangunan daerah

Misi 3 : Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kemandirian aparatur dan masyarakat dalam bidang politik

			C.1.1.1	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Terlaksananya koordinasi forum-forum diskusi politik	Jumlah peserta diskusi politik	200 orang peserta	1.000 orang peserta	200 orang peserta	100,000,000	200 orang peserta	100,000,000	200 orang peserta	100,000,000	200 orang peserta	100,000,000		Terlaksananya diskusi politik	
			C.1.1.2	Penyediaan Jasa Tim Peneliti dn Pemeriksa Persyaratan Bantuan Keuangan Partai Politik	Terlaksananya penyediaan jasa tim peneliti dan pemeriksa persyaratan bantuan keuangan partai politik	Jumlah operasional tim pemeriksa persyaratan bantuan partai politik	12 bulan	60 bulan	12 bulan	50,000,000	12 bulan	50,000,000	12 bulan	50,000,000	12 bulan	50,000,000		Terlaksananya pembinaan terhadap partai politik penerima bantuan keuangan	
			C.1.1.3	Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik	Terlaksananya sosialisasi undang-undang bidang politik	Jumlah peserta sosialisasi	300 orang peserta	1.500 orang peserta	300 orang peserta	150,000,000	300 orang peserta	150,000,000	300 orang peserta	150,000,000	300 orang peserta	150,000,000		Meningkatnya pengetahuan undang-undang bidang politik	
			C.1.1.4	Tim Desk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat	Terlaksananya tim desk pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat	Jumlah operasional tim desk pemilu Bupati	3 bulan	6 bulan	-	0	-	0	-	0	-	0	300,000,000	Terlaksananya tim koordinasi dan fasilitasi pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat	
			C.1.1.5	Tim Desk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung	Terlaksananya tim desk pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung	Jumlah operasional tim desk pemilu Gubernur	-	6 bulan	6 bulan	300,000,000	-	0	-	0	-	0	0	Terlaksananya tim koordinasi dan fasilitasi pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung	
			C.1.1.6	Tim Desk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/ Wakil Presiden	Terlaksananya tim desk pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/ Wakil Presiden	Jumlah operasional tim desk pemilu Legislatif dan Presiden	-	6 bulan	-	0	6 bulan	300,000,000	-	0	-	0	0	Terlaksananya tim desk pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden	
		J U M L A H								1,930,000,000		1,930,000,000		1,630,000,000		1,630,000,000	1,930,000,000	9,050,000,000	Terciptanya administrasi keuangan bagi partai politik penerima bantuan keuangan

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Barat

RUTIN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang optimal	Terciptanya administrasi perkantoran yang baik	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	1.19.1.19.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		100.00%	184,560,000	100.00%	184,560,000	100.00%	184,560,000	100.00%	184,560,000	100.00%	184,560,000	100.00%	922,800,000
				1.19.1.19.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat	12 bulan	12 bulan	3,500,000	12 bulan	3,500,000	12 bulan	3,500,000	12 bulan	3,500,000	12 bulan	3,500,000	60 bulan	17,500,000
				1.19.1.19.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening telepon, listrik dan air	12 bulan	12 bulan	20,100,000	12 bulan	20,100,000	12 bulan	20,100,000	12 bulan	20,100,000	12 bulan	20,100,000	60 bulan	100,500,000
				1.19.1.19.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi kendaraan dinas	1 mobil dan 3 motor	1 mobil dan 5 motor	1,500,000	1 mobil dan 5 motor	1,500,000	1 mobil dan 5 motor	1,500,000	1 mobil dan 5 motor	1,500,000	1 mobil dan 5 motor	1,500,000	5 mobil dan 25 motor	7,500,000
				1.19.1.19.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Buku cek dan administrasi bank		5 buah	500,000	5 buah	500,000	5 buah	500,000	5 buah	500,000	5 buah	500,000	25 buah	2,500,000
				1.19.1.19.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bahan dan alat kebersihan serta tenaga kebersihan	12 bulan	12 bulan	10,700,000	12 bulan	10,700,000	12 bulan	10,700,000	12 bulan	10,700,000	12 bulan	10,700,000	60 bulan	53,500,000
				1.19.1.19.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	11,000,000	12 bulan	11,000,000	12 bulan	11,000,000	12 bulan	11,000,000	12 bulan	11,000,000	60 bulan	55,000,000
				1.19.1.19.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	29,200,000	12 bulan	29,200,000	12 bulan	29,200,000	12 bulan	29,200,000	12 bulan	29,200,000	60 bulan	146,000,000
				1.19.1.19.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat-alat listrik	12 bulan	12 bulan	6,500,000	12 bulan	6,500,000	12 bulan	6,500,000	12 bulan	6,500,000	12 bulan	6,500,000	60 bulan	32,500,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				1.19.1.19.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar	12 bulan	12 bulan	3,960,000	12 bulan	3,960,000	12 bulan	3,960,000	12 bulan	3,960,000	12 bulan	3,960,000	60 bulan	19,800,000
				1.19.1.19.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman rapat/tamu	12 bulan	12 bulan	11,400,000	12 bulan	11,400,000	12 bulan	11,400,000	12 bulan	11,400,000	12 bulan	11,400,000	60 bulan	57,000,000
				1.19.1.19.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	12 bulan	65,000,000	12 bulan	65,000,000	12 bulan	65,000,000	12 bulan	65,000,000	12 bulan	65,000,000	60 bulan	325,000,000
				1.19.1.19.01.01.20	Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran	Pameran	1 kali	1 kali	6,500,000	1 kali	6,500,000	1 kali	6,500,000	1 kali	6,500,000	1 kali	6,500,000	5 kali	32,500,000
				1.19.1.19.01.01.21	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	12 bulan	14,700,000	12 bulan	14,700,000	12 bulan	14,700,000	12 bulan	14,700,000	12 bulan	14,700,000	60 bulan	73,500,000
2	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terciptanya sarana dan prasarana aparatur yang optimal	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.19.1.19.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat sarana dan prasarana aparatur		100.00%	197,500,000	100.00%	197,500,000	100.00%	202,500,000	100.00%	202,500,000	100.00%	207,500,000	100.00%	1,007,500,000
				1.19.1.19.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan gedung kantor	2 unit	8 unit	20,000,000	8 unit	20,000,000	8 unit	20,000,000	8 unit	20,000,000	8 unit	20,000,000	40 unit	100,000,000
				1.19.1.19.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor	1 unit	4 unit	10,000,000	4 unit	10,000,000	4 unit	10,000,000	4 unit	10,000,000	4 unit	10,000,000	20 unit	50,000,000
				1.19.1.19.01.02.10	Pengadaan Meubeleur	Meubeleur	12 unit	15 unit	15,000,000	15 unit	15,000,000	15 unit	20,000,000	25 unit	20,000,000	25 unit	25,000,000	95 unit	95,000,000
				1.19.1.19.01.02.11	Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer	Komputer dan Laptop	2 unit	12 unit	50,000,000	12 unit	50,000,000	12 unit	50,000,000	12 unit	50,000,000	12 unit	50,000,000	60 unit	250,000,000
				1.19.1.19.01.02.14	Pengadaan Alat-Alat Studio	Alat-alat studio		3 unit	20,000,000	3 unit	20,000,000	3 unit	20,000,000	3 unit	20,000,000	3 unit	20,000,000	15 unit	100,000,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				1.19.1.19.01.02.71	Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	Alat-alat komunikasi		3 unit	20,000,000	3 unit	20,000,000	3 unit	20,000,000	3 unit	20,000,000	3 unit	20,000,000	15 unit	100,000,000
				1.19.1.19.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	7,500,000	12 bulan	7,500,000	12 bulan	7,500,000	12 bulan	7,500,000	12 bulan	7,500,000	60 bulan	37,500,000
				1.19.1.19.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1 mobil dan 3 motor	1 mobil, 3 motor	50,000,000	1 mobil, 3 motor	50,000,000	1 mobil, 3 motor	50,000,000	1 mobil, 3 motor	50,000,000	1 mobil, 3 motor	50,000,000	5 mobil, 15 motor	250,000,000
				1.19.1.19.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	12 bulan	5,000,000	12 bulan	5,000,000	12 bulan	5,000,000	12 bulan	5,000,000	12 bulan	5,000,000	60 bulan	25,000,000
3	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terciptanya kapasitas sumber daya aparatur yang baik	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1.19.1.19.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Tingkat kapasitas sumber daya aparatur		100.00%	7,500,000	100.00%	7,500,000	100.00%	7,500,000	100.00%	7,500,000	100.00%	7,500,000	100.00%	37,500,000
				1.19.1.19.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kursus dan pelatihan	12 bulan	12 bulan	7,500,000	12 bulan	7,500,000	12 bulan	7,500,000	12 bulan	7,500,000	12 bulan	7,500,000	60 bulan	37,500,000
4	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terciptanya sistem pelaporan yang baik	Persentase peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang optimal	1.19.1.19.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN OPD	Tingkat pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100.00%	102,900,000	100.00%	81,300,000	100.00%	81,300,000	100.00%	81,300,000	100.00%	81,300,000	100.00%	428,100,000
				1.19.1.19.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	12 bulan	12 bulan	1,000,000	12 bulan	1,000,000	12 bulan	1,000,000	12 bulan	1,000,000	12 bulan	1,000,000	60 bulan	5,000,000
				1.19.1.19.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Laporan keuangan semesteran	2 kali	2 kali	1,000,000	2 kali	1,000,000	2 kali	1,000,000	2 kali	1,000,000	2 kali	1,000,000	10 kali	5,000,000
				1.19.1.19.01.06.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan prognosis realisasi anggaran	1 kali	1 kali	2,000,000	1 kali	2,000,000	1 kali	2,000,000	1 kali	2,000,000	1 kali	2,000,000	5 kali	10,000,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				1.19.1.19.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun	1 kali	1 kali	2,500,000	1 kali	2,500,000	1 kali	2,500,000	1 kali	2,500,000	1 kali	2,500,000	5 kali	12,500,000
				1.19.1.19.01.06.08	Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan OPD	Dokumen perencanaan OPD	12 bulan	12 bulan	9,800,000	12 bulan	9,800,000	12 bulan	9,800,000	12 bulan	9,800,000	12 bulan	9,800,000	60 bulan	49,000,000
				1.19.1.19.01.06.10	Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelola keuangan daerah	12 bulan	12 bulan	61,600,000	12 bulan	65,000,000	12 bulan	65,000,000	12 bulan	65,000,000	12 bulan	65,000,000	60 bulan	321,600,000
				1.19.1.19.01.06.14	Penetapan Renstra OPD 2017-2022	Dokumen Renstra OPD	10 buku	10 buku	25,000,000									10 buku	25,000,000
0																			

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
7

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KANTOR KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Kode	Tujuan / Sasaran / Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan	Data Capaian Tahun 2017	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13
	T U J U A N 1 *																	
A	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib		Angka kriminalitas	0.26%	0.25%	490,000,000	0.24%	490,000,000	0.23%	540,000,000	0.22%	540,000,000	0.21%	530,000,000	0.21%	2,590,000,000		
	S A S A R A N 1																	
A.1	Meningkatnya deteksi dini dan penanganan konflik sosial		Berkurangnya jumlah konflik sosial	100.00%	100.00%	245,000,000	100.00%	245,000,000	100.00%	270,000,000	100.00%	270,000,000	100.00%	265,000,000	100.00%	1,295,000,000		
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
	Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																	
	P r o g r a m																	
A.1.1	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun stabilitas politik yang demokratis dan dinamis	Persentase kecamatan yang menerima pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi negara	33.33%	20.00%	245,000,000	20.00%	245,000,000	20.00%	270,000,000	20.00%	270,000,000	20.00%	265,000,000	100.00%	1,295,000,000		
	K e g i a t a n																	
A.1.1.1	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi	200 orang peserta	200 orang peserta	75,000,000	200 orang peserta	75,000,000	250 orang peserta	80,000,000	250 orang peserta	80,000,000	100 orang peserta	75,000,000	1.000 orang peserta	385,000,000	Seksi Kesbang	Kab. LB
A.1.1.2	Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Premanisme	Terlaksananya sosialisasi bahaya radikalisme, terorisme dan premanisme	Jumlah peserta sosialisasi	100 orang peserta	100 orang peserta	60,000,000	100 orang peserta	60,000,000	250 orang peserta	80,000,000	250 orang peserta	80,000,000	250 orang peserta	80,000,000	950 orang peserta	360,000,000	Seksi Kesbang	Kab. LB
A.1.1.3	Dialog Interaktif Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Terlaksananya dialog interaktif peningkatan kesadaran bela negara	Jumlah peserta dialog interaktif	100 orang peserta	100 orang peserta	60,000,000	100 orang peserta	60,000,000	100 orang peserta	60,000,000	100 orang peserta	60,000,000	100 orang peserta	60,000,000	500 orang peserta	300,000,000	Seksi Kesbang	Kab. LB
A.1.1.4	Rapat Koordinasi Tim Pemantau Kunjungan Tamu Luar Daerah/ Orang Asing (WNA)	Terlaksananya rapat koordinasi tim pemantau kunjungan tamu luar daerah/ orang asing (WNA)	Jumlah rakor	-	1 kali	50,000,000	1 kali	50,000,000	1 kali	50,000,000	1 kali	50,000,000	1 kali	50,000,000	5 kali	250,000,000	Seksi Kesbang	Kab. LB
	P r o g r a m																	
A.2.1	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Meningkatnya peran serta lembaga non pemerintah dalam pembangunan daerah	Persentase pertumbuhan dan perkembangan Ormas dan LSM di Kabupaten Lampung Barat	13.27%	20.00%	60,000,000	20.00%	60,000,000	20.00%	60,000,000	20.00%	60,000,000	20.00%	60,000,000	100.00%	300,000,000		
	T U J U A N 2																	
B	Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat		Jumlah kelompok masyarakat yang memenuhi syarat legalitas	333 Orkemas	350 Orkemas	1,025,000,000	367 Orkemas	1,025,000,000	385 Orkemas	925,000,000	405 Orkemas	925,000,000	425 Orkemas	1,025,000,000	28.00%	4,925,000,000		
	S A S A R A N 2																	

Kode	Tujuan / Sasaran / Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan	Data Capaian Tahun 2017	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
B.1	Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat yang dibentuk secara formal		Persentase kelompok masyarakat yang bermitra dengan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat	100.00%	20.00%	1,025,000,000	22.00%	1,025,000,000	24.00%	925,000,000	26.00%	925,000,000	28.00%	1,025,000,000	100.00%	4,925,000,000		
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
	Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																	
	Program																	
B.1.1	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Meningkatnya peran serta lembaga non pemerintah dalam pembangunan daerah	Persentase pertumbuhan dan perkembangan Ormas/LSM di Kabupaten Lampung Barat	13.27%	20.00%	1,025,000,000	20.00%	1,025,000,000	20.00%	945,000,000	20.00%	945,000,000	20.00%	1,045,000,000	100.00%	4,985,000,000		
	Kegiatan																	
B.1.1.1	Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kab. Lampung Barat	Terlaksananya rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial Kab. LB	Jumlah rakor	-	1 kali	60,000,000	1 kali	60,000,000	1 kali	60,000,000	1 kali	60,000,000	1 kali	60,000,000	5 kali	300,000,000	Seksi Kesbang	Kab. LB
B.1.1.2	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Terlaksananya fasilitasi forum pembauran kebangsaan (FPK)	Jumlah operasional FPK	-	12 bulan	50,000,000	12 bulan	50,000,000	12 bulan	50,000,000	12 bulan	50,000,000	12 bulan	50,000,000	60 bulan	250,000,000	Seksi Kesbang	Kab. LB
B.1.1.3	Forum Silaturahmi dan Pembinaan Ormas/LSM Kab. Lampung Barat	Terlaksananya forum silaturahmi dan pembinaan Ormas/LSM Kab. Lampung Barat	Jumlah peserta forum silaturahmi	250 orang peserta	250 orang peserta	150,000,000	250 orang peserta	150,000,000	150 orang peserta	150,000,000	150 orang peserta	150,000,000	250 orang peserta	150,000,000	1050 orang peserta	750,000,000	Seksi Hubtarga	Kab. LB
B.1.1.4	Penyusunan data Base Kesbang dan Politik	Terlaksananya penyusunan data base Kesbang dan Politik	Jumlah dokumen data base Kesbangpol	100 buku	100 buku	25,000,000	100 buku	25,000,000	100 buku	25,000,000	100 buku	25,000,000	100 buku	25,000,000	500 buku	125,000,000	Seksi Hubtarga	Kab. LB
B.1.1.5	Tes Urine bagi Pejabat dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Terlaksananya tes urine bagi pejabat dan PNS di lingkungan Pemkab. Lampung Barat	Jumlah PNS yang mengikuti tes urine	628 orang peserta	650 orang peserta	250,000,000	650 orang peserta	250,000,000	300 orang peserta	150,000,000	300 orang peserta	150,000,000	650 orang peserta	250,000,000	2550 orang peserta	1,050,000,000	Seksi Politik	Kab. LB
B.1.1.6	Penyediaan Jasa Pendukung Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	Terlaksananya penyediaan jasa pendukung KOMINDA	Jumlah operasional KOMINDA	12 bulan	12 bulan	125,000,000	12 bulan	125,000,000	12 bulan	125,000,000	12 bulan	125,000,000	12 bulan	125,000,000	60 bulan	625,000,000	Seksi Hubtarga	Kab. LB
B.1.1.7	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Terlaksananya fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)	Jumlah operasional FKDM	FKDM Kabupaten	12 bulan	50,000,000	12 bulan	50,000,000	12 bulan	70,000,000	12 bulan	70,000,000	12 bulan	70,000,000	12 bulan	310,000,000	Seksi Kesbang	Kab. LB
B.1.1.8	Sosialisasi dan Pelatihan Satgas Anti Narkotika	Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan satgas anti narkotika	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan	-	789 orang peserta	300,000,000	600 orang peserta	300,000,000	200 orang peserta	300,000,000	200 orang peserta	300,000,000	573 orang peserta	300,000,000	2.362 orang peserta	1,500,000,000	Seksi Politik	Kab. LB
B.1.1.9	Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	Terlaksananya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila	Jumlah peserta	-	100 orang peserta	75,000,000	100 orang peserta	75,000,000	100 orang peserta	75,000,000	100 orang peserta	75,000,000	100 orang peserta	75,000,000	500 orang peserta	375,000,000	Seksi Hubtarga	Kab. LB
	TUJUAN 3																	
C	Meningkatnya kesadaran berpolitik dan berdemokrasi di kalangan masyarakat		Jumlah kasus yang terkait dengan politik		5 kasus	600,000,000	5 kasus	600,000,000	0 kasus	300,000,000	0 kasus	300,000,000	5 kasus	600,000,000	15 kasus	2,400,000,000		
	SASARAN 3																	

Kode	Tujuan / Sasaran / Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan	Data Capaian Tahun 2017	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5													12	13
C.1	Menurunnya kasus konflik terkait politik		Persentase kasus terkait politik yang diselesaikan		100.00%	600,000,000	100.00%	600,000,000	100.00%	300,000,000	100.00%	300,000,000	100.00%	600,000,000	100.00%	2,400,000,000		
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
	Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																	
	P r o g r a m																	
C.1.1	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase partai politik yang difasilitasi	76.92%	76.92%	600,000,000	76.92%	600,000,000	76.92%	300,000,000	76.92%	300,000,000	76.92%	600,000,000	76.92%	2,400,000,000		
	K e g i a t a n																	
C.1.1.1	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Terlaksananya koordinasi forum-forum diskusi politik	Jumlah peserta diskusi politik	200 orang peserta	200 orang peserta	100,000,000	200 orang peserta	100,000,000	200 orang peserta	100,000,000	200 orang peserta	100,000,000	200 orang peserta	100,000,000	1.000 orang peserta	500,000,000	Seksi Politik	Kab. LB
C.1.1.2	Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Bantuan Keuangan Partai Politik	Terlaksananya penyediaan jasa tim peneliti dan pemeriksa persyaratan bantuan keuangan partai politik	Jumlah operasional tim pemeriksa persyaratan bantuan partai politik	12 bulan	12 bulan	50,000,000	12 bulan	50,000,000	12 bulan	50,000,000	12 bulan	50,000,000	12 bulan	50,000,000	60 bulan	250,000,000	Seksi Politik	Kab. LB
C.1.1.3	Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik	Terlaksananya sosialisasi undang-undang bidang politik	Jumlah peserta sosialisasi	300 orang peserta	300 orang peserta	150,000,000	300 orang peserta	150,000,000	250 orang peserta	150,000,000	250 orang peserta	150,000,000	250 orang peserta	150,000,000	1.500 orang peserta	750,000,000	Seksi Politik	Kab. LB
C.1.1.4	Tim Desk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat	Terlaksananya tim desk pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat	Jumlah operasional tim desk pemilu Bupati	3 bulan	-	0	-	0	-	0	-	0	6 bulan	300,000,000	6 bulan	300,000,000	Seksi Politik	Kab. LB
C.1.1.5	Tim Desk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung	Terlaksananya tim desk pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung	Jumlah operasional tim desk pemilu Gubernur	-	6 bulan	300,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	6 bulan	300,000,000	Seksi Politik	Kab. LB
C.1.1.6	Tim Desk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Terlaksananya tim desk pemilu Legislatif dan pemilu Presiden/Wakil Presiden	Jumlah operasional tim desk pemilu Legislatif dan Presiden	-	-	0	6 bulan	300,000,000	-	0	-	0	-	0	6 bulan	300,000,000	Seksi Politik	Kab. LB
	J U M L A H (A)					1,930,000,000		1,930,000,000		1,575,000,000		1,575,000,000		1,970,000,000		8,980,000,000		

Tabel 6.1
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Misi V : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Demokratis dan Berkeadilan

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi negara di Kabupaten Lampung Barat	33.33%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100.00%
2	Persentase pertumbuhan dan perkembangan Ormas dan LSM	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100.00%
3	Persentase partai politik yang difasilitasi	76.92%	76.92%	76.92%	76.92%	76.92%	76.92%	76.92%

TABEL 6.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KANTOR KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Kode	Tujuan / Sasaran / Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan	Data Capaian Tahun 2017	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13
	Non Urusan																	
	S A S A R A N 1																	
A.1	Terciptanya administrasi perkantoran yang baik		Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		100.00%	184,560,000	100.00%	184,560,000	100.00%	184,560,000	100.00%	184,560,000	100.00%	184,560,000	100.00%	922,800,000		
	P r o g r a m																	
A.1.1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		100.00%	184,560,000	100.00%	184,560,000	100.00%	184,560,000	100.00%	184,560,000	100.00%	184,560,000	100.00%	922,800,000		
	K e g i a t a n																	
A.1.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Surat menyurat	12 bulan	12 bulan	3,500,000	12 bulan	3,500,000	12 bulan	3,500,000	12 bulan	3,500,000	12 bulan	3,500,000	60 bulan	17,500,000	Subbag Tata Usaha	Kab. LB
A.1.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening telepon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	20,100,000	12 bulan	20,100,000	12 bulan	20,100,000	12 bulan	20,100,000	12 bulan	20,100,000	60 bulan	100,500,000	Subbag Tata Usaha	Kab. LB
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Administrasi kendaraan dinas	1 mobil dan 3 motor	1 mobil dan 5 motor	1,500,000	1 mobil dan 5 motor	1,500,000	1 mobil dan 5 motor	1,500,000	1 mobil dan 5 motor	1,500,000	1 mobil dan 5 motor	1,500,000	5 mobil dan 25 motor	7,500,000	Subbag Tata Usaha	Kab. LB
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	Buku cek dan administrasi bank	1 buah	5 buah	500,000	5 buah	500,000	5 buah	500,000	5 buah	500,000	5 buah	500,000	25 buah	2,500,000	Subbag Tata Usaha	Kab. LB
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	Bahan dan alat kebersihan serta tenaga kebersihan	12 bulan	12 bulan	10,700,000	12 bulan	10,700,000	12 bulan	10,700,000	12 bulan	10,700,000	12 bulan	10,700,000	60 bulan	53,500,000	Subbag Tata Usaha	Kab. LB
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	11,000,000	12 bulan	11,000,000	12 bulan	11,000,000	12 bulan	11,000,000	12 bulan	11,000,000	60 bulan	55,000,000	Subbag Tata Usaha	Kab. LB
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetak dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	29,200,000	12 bulan	29,200,000	12 bulan	29,200,000	12 bulan	29,200,000	12 bulan	29,200,000	60 bulan	146,000,000	Subbag Tata Usaha	Kab. LB
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Alat-alat listrik	12 bulan	12 bulan	6,500,000	12 bulan	6,500,000	12 bulan	6,500,000	12 bulan	6,500,000	12 bulan	6,500,000	60 bulan	32,500,000	Subbag Tata Usaha	Kab. LB
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar	12 bulan	12 bulan	3,960,000	12 bulan	3,960,000	12 bulan	3,960,000	12 bulan	3,960,000	12 bulan	3,960,000	60 bulan	19,800,000	Subbag Tata Usaha	Kab. LB
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman rapat/tamu	12 bulan	12 bulan	11,400,000	12 bulan	11,400,000	12 bulan	11,400,000	12 bulan	11,400,000	12 bulan	11,400,000	60 bulan	57,000,000	Subbag Tata Usaha	Kab. LB
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	12 bulan	65,000,000	12 bulan	65,000,000	12 bulan	65,000,000	12 bulan	65,000,000	12 bulan	65,000,000	60 bulan	325,000,000	Subbag Tata Usaha	Kab. LB

Kode	Tujuan / Sasaran / Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan	Data Capaian Tahun 2017	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13
	Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/ Pameran	Terlaksananya penyediaan jasa propaganda/publikasi/ pameran	Pameran	1 kali	1 kali	6,500,000	1 kali	6,500,000	1 kali	6,500,000	1 kali	6,500,000	1 kali	6,500,000	5 kali	32,500,000	Subbag Tata Usaha	Kab. LB
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	12 bulan	14,700,000	12 bulan	14,700,000	12 bulan	14,700,000	12 bulan	14,700,000	12 bulan	14,700,000	60 bulan	73,500,000	Subbag Tata Usaha	Kab. LB
	S A S A R A N 2																	
A.2	Terciptanya sarana dan prasarana aparatur yang optimal		Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100.00%	197,500,000	100.00%	197,500,000	100.00%	202,500,000	100.00%	202,500,000	100.00%	207,500,000	100.00%	1,007,500,000		
	P r o g r a m																	
A.2.1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat sarana dan prasarana aparatur		100.00%	197,500,000	100.00%	197,500,000	100.00%	202,500,000	100.00%	202,500,000	100.00%	207,500,000	100.00%	1,007,500,000		
	K e g i a t a n																	
A.2.1.1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor	2 unit	8 unit	20,000,000	8 unit	20,000,000	8 unit	20,000,000	8 unit	20,000,000	8 unit	20,000,000	40 unit	100,000,000	Subbag Tata Usaha	Kab. LB
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor	1 unit	4 unit	10,000,000	4 unit	10,000,000	4 unit	10,000,000	4 unit	10,000,000	4 unit	10,000,000	20 unit	50,000,000	Subbag Tata Usaha	Kab. LB
	Pengadaan Meubeleur	Terlaksananya pengadaan meubeleur	Meubeleur	12 unit	15 unit	15,000,000	15 unit	15,000,000	15 unit	20,000,000	25 unit	20,000,000	25 unit	25,000,000	95 unit	95,000,000	Subbag Tata Usaha	Kab. LB
	Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer	Terlaksananya pengadaan komputer/jaringan komputer	Komputer dan Laptop	2 unit	12 unit	50,000,000	12 unit	50,000,000	12 unit	50,000,000	12 unit	50,000,000	12 unit	50,000,000	60 unit	250,000,000	Subbag Tata Usaha	Kab. LB
	Pengadaan Alat-Alat Studio	Terlaksananya pengadaan alat-alat studio	Alat-alat studio		3 unit	20,000,000	3 unit	20,000,000	3 unit	20,000,000	3 unit	20,000,000	3 unit	20,000,000	15 unit	100,000,000	Subbag Tata Usaha	Kab. LB
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	7,500,000	12 bulan	7,500,000	12 bulan	7,500,000	12 bulan	7,500,000	12 bulan	7,500,000	60 bulan	37,500,000	Subbag Tata Usaha	Kab. LB
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1 mobil dan 3 motor	1 mobil dan 3 motor	50,000,000	1 mobil dan 3 motor	50,000,000	1 mobil dan 3 motor	50,000,000	1 mobil dan 3 motor	50,000,000	1 mobil dan 3 motor	50,000,000	5 mobil dan 15 motor	250,000,000	Subbag Tata Usaha	Kab. LB
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	12 bulan	5,000,000	12 bulan	5,000,000	12 bulan	5,000,000	12 bulan	5,000,000	12 bulan	5,000,000	60 bulan	25,000,000	Subbag Tata Usaha	Kab. LB
	Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	Terlaksananya pengadaan alat-alat komunikasi	Alat-alat komunikasi		3 unit	20,000,000	3 unit	20,000,000	3 unit	20,000,000	3 unit	20,000,000	3 unit	20,000,000	15 unit	100,000,000	Subbag Tata Usaha	Kab. LB

Kode	Tujuan / Sasaran / Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan	Data Capaian Tahun 2017	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13
	S A S A R A N 3																	
A.3	Terciptanya kapasitas sumber daya aparatur yang baik		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100.00%	7,500,000	100.00%	7,500,000	100.00%	7,500,000	100.00%	7,500,000	100.00%	7,500,000	100.00%	37,500,000		
	P r o g r a m																	
A.3.1	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tingkat kapasitas sumber daya aparatur		100.00%	7,500,000	100.00%	7,500,000	100.00%	7,500,000	100.00%	7,500,000	100.00%	7,500,000	100.00%	37,500,000		
	K e g i a t a n																	
A.3.1.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	Kursus dan pelatihan	12 bulan	12 bulan	7,500,000	12 bulan	7,500,000	12 bulan	7,500,000	12 bulan	7,500,000	12 bulan	7,500,000	60 bulan	37,500,000	Subbag Tata Usaha	Kab. LB
	S A S A R A N 4																	
A.4	Terciptanya peningkatan sistem pelaporan yang baik		Persentase peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang optimal		100.00%	102,900,000	100.00%	81,300,000	100.00%	81,300,000	100.00%	81,300,000	100.00%	81,300,000	100.00%	428,100,000		
	P r o g r a m																	
A.4.1	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN OPD	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan OPD	Tingkat pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100.00%	102,900,000	100.00%	81,300,000	100.00%	81,300,000	100.00%	81,300,000	100.00%	81,300,000	100.00%	428,100,000		
	K e g i a t a n																	
A.4.1.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	12 bulan	12 bulan	1,000,000	12 bulan	1,000,000	12 bulan	1,000,000	12 bulan	1,000,000	12 bulan	1,000,000	60 bulan	5,000,000	Subbag Tata Usaha	Kab. LB
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran	2 kali	2 kali	1,000,000	2 kali	1,000,000	2 kali	1,000,000	2 kali	1,000,000	2 kali	1,000,000	10 kali	5,000,000	Subbag Tata Usaha	Kab. LB
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan prognosis realisasi anggaran	1 kali	1 kali	2,000,000	1 kali	2,000,000	1 kali	2,000,000	1 kali	2,000,000	1 kali	2,000,000	5 kali	10,000,000	Subbag Tata Usaha	Kab. LB
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun	1 kali	1 kali	2,500,000	1 kali	2,500,000	1 kali	2,500,000	1 kali	2,500,000	1 kali	2,500,000	5 kali	12,500,000	Subbag Tata Usaha	Kab. LB
	Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan OPD	Terlaksananya penyusunan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD	Dokumen perencanaan OPD	12 bulan	12 bulan	9,800,000	12 bulan	9,800,000	12 bulan	9,800,000	12 bulan	9,800,000	12 bulan	9,800,000	60 bulan	49,000,000	Subbag Tata Usaha	Kab. LB
	Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah	Pengelola keuangan daerah	12 bulan	12 bulan	61,600,000	12 bulan	65,000,000	12 bulan	65,000,000	12 bulan	65,000,000	12 bulan	65,000,000	60 bulan	321,600,000	Subbag Tata Usaha	Kab. LB
	Penetapan Renstra OPD 2017 - 2022	Terlaksananya penetapan Renstra OPD 2017 - 2022	Dokumen Renstra OPD	10 buku	10 buku	25,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	10 buku	25,000,000	Subbag Tata Usaha	Kab. LB
	J U M L A H (B)					492,460,000		470,860,000		475,860,000		475,860,000		480,860,000		2,395,900,000		

Kode	Tujuan / Sasaran / Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan	Data Capaian Tahun 2017	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13
	J U M L A H (A+B)					2,422,460,000		2,400,860,000		2,050,860,000		2,050,860,000		2,450,860,000		11,375,900,000		

	TUJUAN *																	
	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib		% konflik agama yang terselesaikan															
			% Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3) yang terselesaikan															

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	I n d i k a t o r	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase gejala konflik yang dapat diatasi	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2	Persentase cakupan wilayah rawan konflik	8.09%	7.35%	5.88%	4.41%	2.94%	1.47%	1.47%
3	Jumlah kelompok masyarakat yang memenuhi syarat legalitas	333 orkemas	350 orkemas	367 orkemas	385 orkemas	405 orkemas	425 orkemas	425 orkemas
4	Persentase kasus terkait politik yang diselesaikan		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%